Rumah di Tanah Harapan

Kisah Pembangunan Pascabencana di Sulawesi Tengah



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Rumah di Tanah Harapan

Kisah Pembangunan Pascabencana di Sulawesi Tengah

Rumah di Tanah Harapan
Kisah Pembangunan Pascabencana di Sulawesi Tengah

2024- Balai P2P Sulawesi II xxx + 166 hal.; 20x25 cm

Cetakan Pertama, Oktober 2024

Penanggunjawab

Iwan Suprijanto

Pengarah

Dedy Permadi, Yusniewati Ismail, Bakhtiar, Prakarsa Yoga, Mulya Permana, Muhammad Yunus, Erpika Ansela Surira, Zulfahmi, Aloysius Rio Bachtiar, Teguh M Abduh

Editor

Yunita

Penulis

Heru Prasetia, Kusen Alipah Hadi. Muhammad Marzuki, Muh. Zainuddin Badollahi, Muklas Aji Setiawan, Wijang Wijanarko

Foto

Basri Marzuki, Dwi Pramono Cahyo, Josua Marunduh, Muh Taufan Surya Putra Bustan, Dokumentasi CSRRP

Sampul dan Tata Letak

Asah Ideana

Diterbitkan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jl. Sungai Surumana No.35, Siranindi, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111.

Seluruh isi buku ini boleh diperbanyak (kecuali foto dan ilustrasi), disebarluaskan dan dicetak dalam bentuk apapun dengan menyebut sumber selama tidak untuk tujuan komersial atau diperjualbelikan. Mengubah, mengedit atau mengutip sebagian yang dapat menyebabkan perubahan makna adalah tidak diizinkan. Bagi yang ingin mencetak dengan tujuan komersial, wajib memberitahukan dan meminta izin kepada kami.

Rumah di Tanah Harapan

Kisah Pembangunan Pascabencana di Sulawesi Tengah

diterbitkan oleh

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2024

Daftar Isi

Daftar Istilah	v
Kata Pengantar	viii
Prolog	xvi
Gempa Bumi 2018 di Sulawesi	1
Bangkit Bersama: Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	29
Membangun Harapan Baru dengan RISHA	61
Konsolidasi dari Hati ke Hati	83
Buah Kegigihan dan Kesabaran	99
Epilog	120
Daftar Pustaka	160
Profil Penulis	162

Daftar Istilah

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
AWP	: Annual Work Plan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Biro Pusat Statistik
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CERC	: Contingency Emergency Response Component
CSRRP	: Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Huntara	: Hunian Sementara
Huntap	: Hunian Tetap
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
Risha	: Rumah Instan Sederhana Sehat
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
WTB	: Warga Terdampak Bencana
ZRB	: Zona Rawan Bencana





Kata Pengantar

Oleh

Iwan Suprijanto
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR

Jika akhirnya buku “Rumah di Tanah Harapan” ini sampai di tangan pembaca, itu artinya, apa yang kami sebut sebagai “operasi kemanusiaan” telah memasuki babak akhir. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, diikuti tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu, Sigi, dan Donggala telah memberi pelajaran kepada banyak pihak. Bahwa menangani bencana tidak boleh kehilangan *golden time*, agar “operasi kemanusiaan” tidak berubah menjadi proyek reguler. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dikerjakan secepat mungkin.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, membangun 8.000 Hunian Sementara (Huntara) dalam waktu empat bulan pada tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun Huntara didesain memiliki umur ketahanan lebih dari dua tahun, namun kami selalu mendorong pembangunan Hunian Tetap (Huntap) secepat mungkin. Tidak ada enaknya berlama-lama tinggal di Huntara.

Dalam upaya mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah dengan mempertimbangkan pemahaman, kapasitas, dan kerentanan yang ada untuk kemudian dilakukan upaya mitigasi risikonya. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan membangun kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan melalui: (i) Pemilihan lokasi yang aman; (ii) Penggunaan teknologi konstruksi yang berketahanan; (iii) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana; (iv) Membuka peluang pelaksanaan beragam inovasi untuk pemulihan pascabencana.

Pengelolaan kegiatannya menerapkan prinsip *good governance*, yakni; partisipatif, akuntabel, transparan, efektif, efisien, adil dan inklusif.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun Huntap relokasi bagi warga yang rumahnya hilang atau rusak berat berada di zona rawan bencana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II selaku Project Implementation Unit (PIU) yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pelaksanaan kegiatan, PIU senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

Dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatannya, PIU dibantu oleh fasilitator yang berperan sebagai tenaga pendamping penerima manfaat. Lingkup tugas pendamping adalah mendukung PIU Ditjen Perumahan dalam melaksanakan kegiatan relokasi, meliputi sosialisasi tentang kegiatan relokasi pada warga, memberikan peningkatan kapasitas warga, dan memfasilitasi kegiatan pascahuni. Pendamping juga ditugaskan memberikan dukungan teknis pada pemerintah kota/kabupaten dalam penyusunan dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) yang disusun sebelum memulai proses konstruksi. Dokumen LARAP merupakan dokumen yang memuat seluruh proses pengadaan lahan dan catatan proses pembangunan Huntap, data profil warga yang akan menempati hunian, rencana aksi pemindahan warga dari lokasi asal, rencana aksi pemulihan dan rencana dukungan dari pemerintah daerah dan swasta.

Pada babak akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR telah membangun 5.598 unit Huntap. Pelaksanaannya dibiayai melalui dana Contingency Emergency Response Component (CERC) di dalam proyek National Slum Upgrading Program (NSUP) sebanyak 1.679 unit, melalui dana Central Sulawesi Rehabilitation

and Reconstruction Project (CSRRP) sebanyak 3.880 unit, dan melalui APBN sebanyak 39 unit yang tersebar di 38 lokasi berada di tujuh kelurahan di Kota Palu, di delapan desa di Kabupaten Sigi dan di 12 desa di Kabupaten Donggala.

Huntap yang dibangun adalah rumah model Risha yang dilengkapi infrastruktur permukiman serta sarana, prasarana, dan utilitasnya. Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) merupakan rumah dengan teknologi konstruksi *knock-down* yang dapat dibangun dengan waktu cepat, menggunakan beton bertulang pada struktur utamanya. Dalam proses konstruksi, metode pembangunan Risha bisa dilakukan di luar lokasi Huntap. Proses pembuatan elemen, komponen, atau modul bangunan dibuat terlebih dulu di luar lokasi dan dibawa ke lokasi Huntap dalam wujud konstruksi yang sudah jadi.

Dari pengalaman menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di banyak tempat, Kementerian PUPR merasa perlu melakukan institusionalisasi ‘operasi kemanusiaan’ di atas. Terbitnya Peraturan Lembaga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat menjadikan kerja-kerja cepat penanganan pascabencana terhindar dari menerobos aturan yang berlaku. Secara manajerial,

kami mulai memperkenalkan manajemen stok Risha. Kami membeli dan menyimpan Risha yang moda produksinya dilakukan oleh warga melalui skema Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan kepada personal Kementerian PUPR, kami selalu meminta menempatkan dirinya dalam posisi Warga Terdampak Bencana (WTB). Dengan cara itu, kami meyakini, rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya urusan fisik semata, namun juga urusan kemanusiaan.

Kini, harapan warga untuk menghuni Huntap telah terpenuhi. Kami mengharapkan keterlibatan aktif semua pihak tidak hanya warga korban dalam mewujudkan tradisi, kehidupan, dan harapan baru.



MENGAMBIL AIR BERSIH - Seorang anak mengambil air bersih dari sebuah penampungan air yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (11/10/ 2018).


KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
CIPTA KARYA
TA.2017
TANGKI AIR 4000

Prolog

Negara Tak Boleh Libur

Beberapa tahun lalu media massa di seluruh dunia mengulas tentang “berhentinya” Pemerintah Amerika Serikat karena polemik keuangan di negaranya. Susah dibayangkan, sebuah pemerintahan harus berhenti atau jeda sementara. Tidak terbayang betapa rumitnya urusan pelayanan masyarakat jika pemerintah harus berhenti, meskipun sejenak.

Pernah juga ada sebuah status nakal di media sosial yang menggambarkan masyarakat sedang bekerja bakti memperbaiki jalan atau jembatan yang rusak, tampak di sebelahnya papan pengumuman yang berbunyi “masyarakat lembur kerja memperbaiki jalan karena pemerintah sedang sibuk dan libur.” Sungguh sindiran yang sangat mengejek. Coba bayangkan “negara” absen atau libur sehingga masyarakat harus lembur untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Di sekitar kita sering pula ditemukan cerita sejenis. Misalnya di bidang kesehatan kita akan sering melihat plakat praktek

dokter yang menyatakan buka setiap hari pada jam-jam tertentu, namun untuk hari minggu dan hari besar yang lainnya tutup. Lalu bagaimana jika masyarakat menderita sakit di hari libur? Bukankah sakit seringkali tidak kompromi datangnya? Dalam masalah kesehatan seperti ini, masyarakat tidak perlu khawatir karena jika dokternya libur, masih ada *emergency unit* atau unit gawat darurat yang selalu tersedia di setiap rumah sakit.

Urusan gawat darurat tersebut ternyata berlaku pula untuk penanganan bencana. Pada banyak kasus penanganan bencana, negara hadir untuk membantu masyarakatnya yang sedang ditimpa masalah. Setidaknya itu yang tercermin dalam kasus penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 lalu. Negara tidak pernah libur dan melakukan serangkaian aktifitas penanganan. Mulai dari tanggap darurat, penyediaan Hunian Sementara (Huntara), hingga program-program penanganan yang lain. Negara juga mengupayakan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat korban bencana pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.





BANTUAN LOGISTIK - Personel TNI menurunkan bantuan logistik untuk WTB gempabumi, tsunami, dan likuifaksi di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu (8/10/2018).





Sejak hari-hari awal kejadian bencana, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, telah hadir di Sulawesi Tengah untuk kegiatan tanggap darurat, upaya membangun pengungsian sementara, penyediaan air bersih dan membuka isolasi wilayah bencana. Dalam melakukan berbagai kegiatan penanganan bencana pemerintah akan bekerjasama dengan lembaga donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik nasional maupun internasional – yang melakukan berbagai aktivitas di bidang perumahan, prasarana dan sarana lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kementerian PUPR bersama dengan kementrian dan lembaga lainnya terus melakukan kerja-kerja untuk mengurangi beban warga terdampak bencana. Kerja-kerja pertama yang dilakukan pascabencana yang juga sering disebut masa tanggap darurat adalah dengan penyediaan dan pemulihan infrastruktur dasar, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih serta pengelolaan limbah rumah tangga.

Dalam masa itu pula Kementerian PUPR bekerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten berupaya menyediakan sejumlah Hunian Sementara (Huntara) bagi para warga terdampak bencana. Pemerintah daerah diminta mengupayakan penyediaan lahan untuk lokasi Huntara. Tanah negara, lapangan sepak bola, maupun tanah-tanah warga yang memungkinkan untuk disewa telah diserahkan kepada Kementerian PUPR.

Tentu penyediaan lahan ini tidaklah mudah. Pembangunann Huntara yang dilakukan juga perlu diperjuangkan dengan waktu cepat serta akurat agar warga terdampak dapat terlayani kebutuhan hunian yang paling minimal. Huntara dibangun menggunakan material baja ringan serta produk industri lain dengan harapan bisa dikerjakan cepat, biaya sesuai standar dan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Huntara tersebut dilengkapi listrik, air bersih dan pengolahan limbah yang cukup. Dengan begitu, warga bisa segera menata kembali hidupnya, terpenuhi hak-hak pribadi dan sosialnya.




POLRI





Tidak berhenti pada penanganan darurat, Kementerian PUPR juga kembali membantu warga untuk mendapatkan rumah hunian tetap. Khususnya bagi warga terdampak bencana yang sebelumnya tinggal di zona merah. Zona merah ini telah ditetapkan pemerintah untuk tidak menjadi kawasan permukiman karena ancaman bahaya yang terjadi cukup besar.

Penyediaan hunian tetap bagi warga yang direlokasi ini dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang lain, seperti sekolah, rumah sakit, termasuk infrastruktur dasar jalan, jalan lingkungan, listrik, air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pengelolaan sampah.

Proses penyediaan rumah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pernak-pernik masalah dari mulai penyediaan lahan, pembangunan rumah, dan infrastruktur dasar, hingga penentuan warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan aturan, tenyata membutuhkan waktu, tenaga, serta pemikiran yang cukup besar. Proses penghunian Huntap pascapembangunan rumah juga bukan perkara yang mudah. Membagi tapak rumah kepada ribuan warga terdampak bencana membutuhkan upaya yang cukup besar agar tidak terjadi kecemburuan dan meninggalkan masalah-masalah sosial

kelak di kemudian hari.

Selepas urusan pembangunan rumah dan infrastruktur dasar, Kementerian PUPR, masih harus melakukan kerja-kerja lanjutan untuk membuka peluang agar warga terdampak bencana dapat memulai kehidupan yang lebih baik. Segala daya diupayakan dengan merealokasi anggaran atau mengusahakan dana pinjaman asing yang akan diangsur bersama seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat mengurangi beban dan kesedihan warga terdampak bencana

Kerja-kerja PUPR melalui Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman ini setidaknya menjadi bukti bahwa “negara” hadir dan “bukti cinta” bagi seluruh masyarakat Indonesia kepada warga yang sedang terdampak bencana.


No. 35







LANDSKAP KOTA PALU - Pemandangan Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan ikon Jembatan Kuning yang menghubungkan Palu Timur dengan Palu Barat (25/5/2010).

Gempa Bumi 2018 di Sulawesi

Siang hari, 28 September 2018, ketika matahari berada di atas kepala, gempa berkekuatan 6 skala Richter membuat Sulawesi bagian tengah terguncang. Tidak lama setelahnya, berselang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 5 sore gempa berkekuatan magnitude 7,5 mengguncang Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya. Para peneliti dunia dibuat terkejut dengan kejadian gempa *supershear* ini, gempa yang sangat langka: gempa diikuti likuifaksi!

Foto: BMZ

Gempa yang kemudian disusul tsunami di sepanjang bibir Teluk Palu meluluhlantakkan ribuan bangunan dan melempar segala yang dilalui hingga jauh.

Rumah-rumah hanya menyisakan tiang-tiangnya saja, sementara dinding dan atap entah kemana. Ada mobil terhempas dan tersangkut di pertengahan menara TVRI; Badan-badan jalan bergelombang dan terbelah tak karuan; Pohon-pohon tumbang menutupi akses jalan; Gelap gulita karena listrik mati; Jika ada bangunan yang masih tersisa dan utuh bentuknya adalah masjid terapung. Ia hanya miring.



KONDISI MASJID TERAPUNG - Kondisi Masjid Akram Babul Rahman atau masjid terapung yang rusak setelah diterjang tsunami di pantai Kampung Lere, Kota Palu (16/10/2018).

Peristiwa ini bertepatan dengan pembukaan Festival Palu Nomoni, sehingga jatuhnya korban jiwa tidak bisa dihindari karena mobilisasi ribuan penonton dan pengisi acara di anjungan, depan TVRI, di Pantai Talise.

Gempa susulan terjadi beberapa kali setelahnya. Kacau-balau. Warga mulai berlarian ke Lapangan Vatulemo di depan Kantor Wali Kota Palu, ke Bandara Mutiara Sis Aljufri, ke arah pekuburan di Talise, mengungsi ke tanah-tanah lapang. Hanya lampu kendaraan bersliweran menerangi jalan. Teriakan warga tidak henti terdengar "Tsunami datang! Tsunami datang! Tsunami datang…." Kemudian warga menuju depan kampus Universitas Muhammadiyah Palu, menuju eks MTQ di Bukit Panggona, atau tempat-tempat lain yang dianggap lebih tinggi. "Benar-benar panik. Masing-masing orang yang ingin menyelamatkan diri sudah tidak karuan. Ada yang tidak memakai baju, tidak memakai alas kaki, perempuan hanya mengenakan



daster, ada yang mengenakan pakaian dalam keadaan basah," tulis Tasman Banto dalam bukunya Lukuefaksi Palu Menggemparkan Dunia.

"Saya pun juga tak percaya kalau tsunami itu sudah mulai berjalan dari arah belakang saya. Waktu itu, semua orang berhamburan, berlarian ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami".

Sementara di Balaroa, Palu Barat dan Petobo, Palu Timur, tanah seperti berputar, muncrat, membelah, dan menghisap. Di Jono Oge dan Sibalaya, Sigi, pohon kelapa dan rumah-rumah berjalan, digerakkan oleh tanah yang berubah menjadi cair, membawa serta semua yang ada di atasnya. Warga berteriak-teriak "Tsunami tanah! Tsunami tanah! Tsunami tanah…." Belakangan, kita mengenal tanah-tanah pasir yang kaya kandungan air akan kehilangan struktur dan kekuatan karena adanya tegangan, semisal gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak, sehingga berubah menjadi cair: likuifaksi.



Gempa besar ini akibat aktivitas sesar Palu-Koro, sebuah sesar gempa yang memanjang dari perairan laut Sulawesi hingga Teluk Bone. Sesar Palu-Koro merupakan sesar yang terbentuk akibat peristiwa benturan ketiga lempeng tektonik yakni lempeng mikrotektonik aktif Benua Australia (Banggai-Sulawesi Tengah) dari timur ke lempeng Benua Europa-Asia/Sunda Land dari barat dan lempang mikro laut Filipina dari utara.









Tepatnya, aktifitas ini berpusat di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Sesaat kemudian, tsunami menghantam pantai barat Sulawesi. Gempa bumi besar ini memicu likuifaksi dan tanah longsor besar di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Tanah berlumpur telah menimbun ribuan rumah hingga kedalaman 5 m. Banyak rumah dan bangunan yang bergeser jauh dari lokasinya semula.

Memori Kolektif



Sebelum peristiwa besar 2018 yang menelan banyak kerugian, Pulau Sulawesi telah sangat sering diguncang gempa. Sejarah mencatat sejak tahun 1905 Sulawesi kerap dilanda gempa. Gempa bumi di Sulawesi Tengah terjadi pada tahun 1905, 1907, 1909, 1927, 1930, 1968, 1994, 1996, 2005, 2012 dan terakhir adalah Gempa Bumi Padagimo (Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong) pada tahun 2018. Gempa yang berguncang pada 2018 itu juga membuat gempa dengan disertai tsunami. Selain itu, pada tahun 1938 gempa yang dilanjutkan tsunami menerjang wilayah Mamboro di Kabupaten Donggala. Sejarah juga mencatat gempa besar terjadi di Laut Sulawesi dan menyebabkan tsunami yang menerjang Donggala pada tahun 1930.



INGATAN - Seorang bapak bersama dua anaknya menatap ke laut lepas untuk mengenang tragedi tsunami di tempat itu. Di lokasi itu dibangun proyek reklamasi pantai untuk pembuatan tambatan perahu di Pantai Kampung Lere, Kota Palu (25/4/2022).

Tidak mengherankan jika bencana-bencana yang terjadi ini tersimpan sebagai memori kolektif. Bait-bait *kayori* (syair) Suku Kaili misalnya, menyimpan ingatan tentang daerah Tanjung Mamboro yang mengalami penurunan tanah, begitupun di Tondo yang dikenal sebagai Tana Runtu, di Kelurahan Talise, Palu.

Atau cerita ingatan warga mulai dari Kulawi (Kabupaten Sigi), Kota Palu, hingga Pantai Barat (Kabupaten Donggala), sering mendapat cerita dari kakek-nenek tentang *bombatalu*, yang berarti gelombang tiga, sebuah istilah untuk menunjuk gempa besar dan diikuti tsunami.

Mereka mengingatnya sebagai cerita yang mengisahkan goncangan selama 3 bulan. Bahkan, ketika memasak, belanga harus digantung pada tiang kayu, agar tidak terbalik



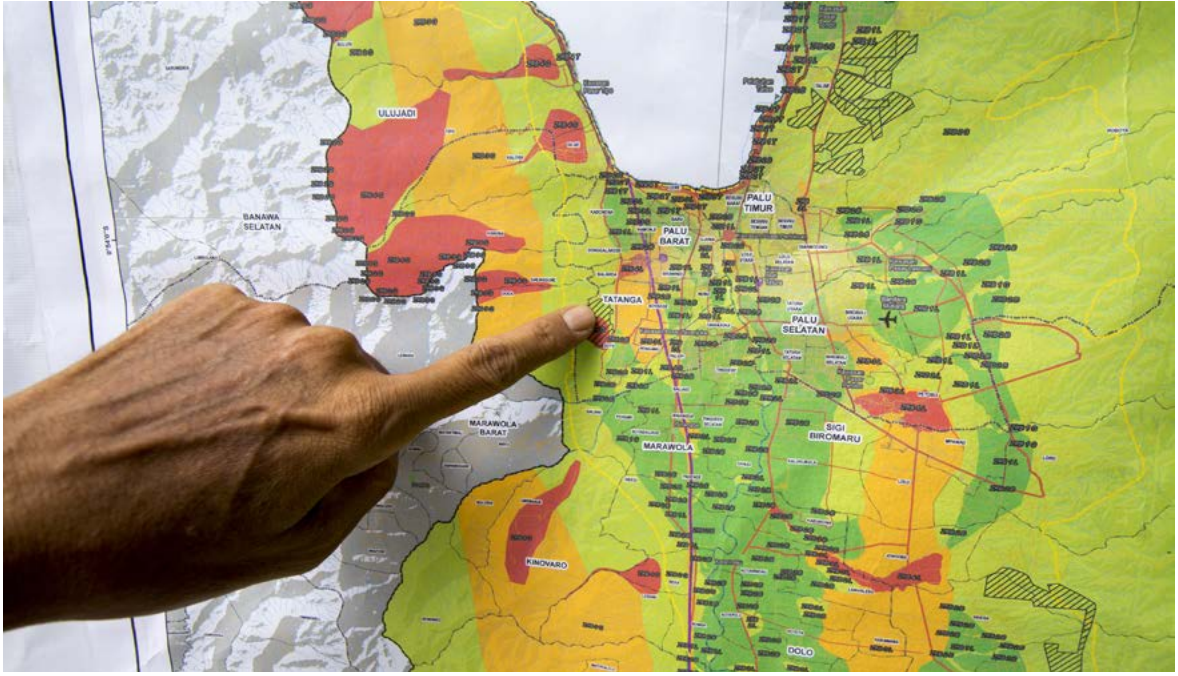
BACA BUKU - Seorang anak penyintas bencana memilih buku yang akan dibaca di Perpustakaan Keliling Nemu Buku di Huntara Petobo, Kota Palu (30/7/2019).

karena guncangan gempa; Atau Desa Jono Oge yang dapat diartikan banyak Alang-alang. Habitat Alang-alang tumbuh pada area terbuka, setengah tertutup, dan rawa-rawa. Dahulu, wilayah Jono Oge adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Paneki maka sangat mungkin merupakan daerah rawa-rawa, di mana banyak ditumbuhi Alang-alang: Atau daerah Duyu di Kota Palu yang berarti longsor.



PEMULIHAN KEJIWAAN ANAK - Relawan memandu anak-anak penyintas bencana bermain di Ruang Ramah Anak Petobo, Kota Palu (30/7/2019).

Atau narasi terbentuknya Lembah Palu dan Danau Lindu yang digenggam erat masyarakat Sigi dan Donggala hingga kini. Menurut cerita, ketika Sawerigading singgah di Perairan Kaili, dan menambatkan perahunya di Pelabuhan Bora di wilayah Kerajaan Sigi, Labolong, si anjing raksasa milik Sawerigading mendadak turun. Ia mengejar buruan dan terperosok ke dalam telaga dimana hidup belut raksasa bernama Lindu. Maka seketika itu, Lindu langsung menggigit kaki Labolong. Si anjing raksasa melakukan perlawanan. Saking dasyatnya perkelahian maka mengakibatkan gempa bumi yang dasyat pula. Kubangan tempat hidup Lindupun bergejolak, berubah menjadi air bah, menerjang pepohonan dan bukit-bukit. Gempa bumi diikuti banjir bandang dan tanah longsor. Setelahnya, Perairan

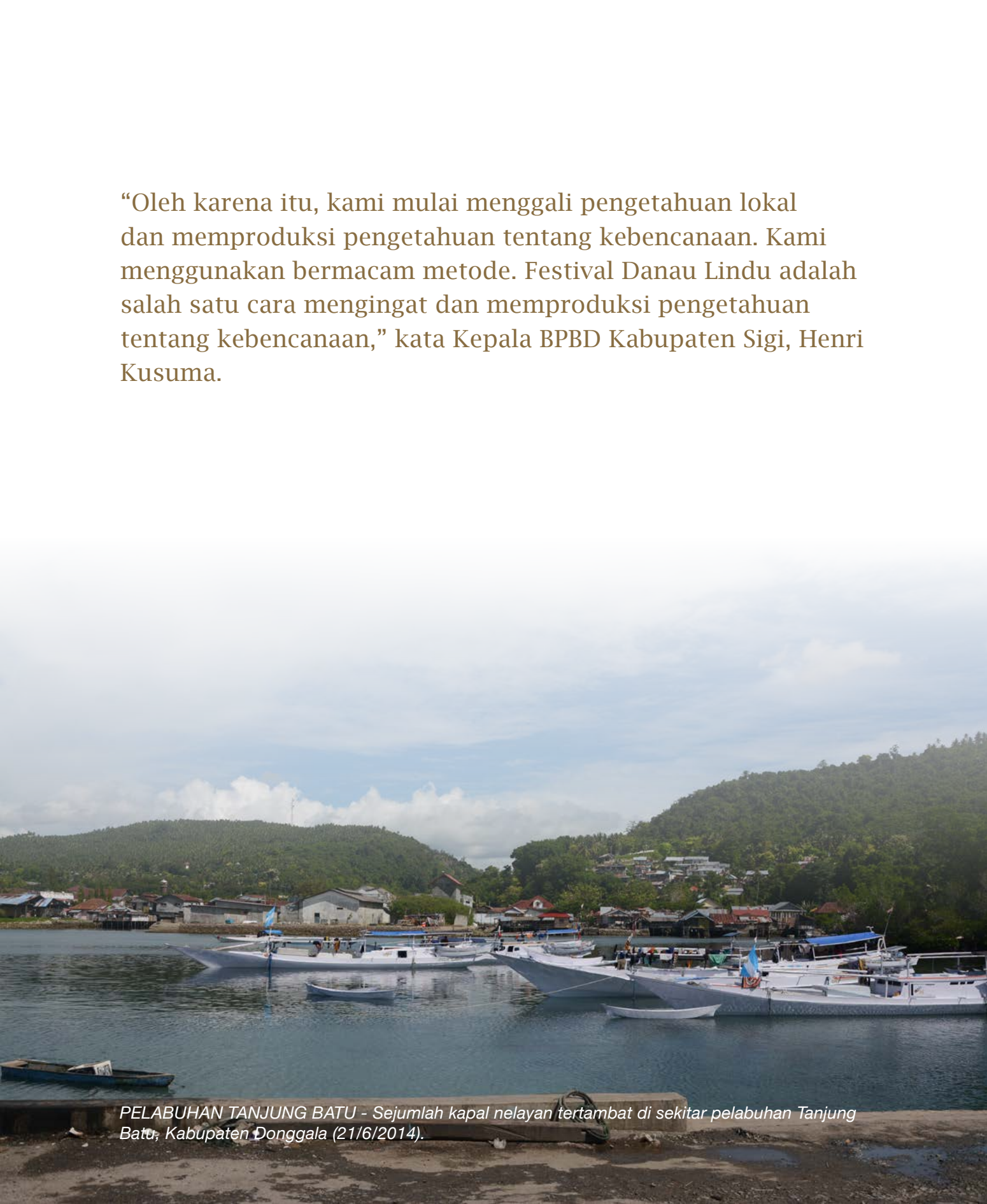


ZONA RAWAN BENCANA - Warga mengidentifikasi lokasi huniannya di peta zona rawan bencana Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala (8/1/2019).

Kaili yang sebelumnya menjadi tempat pelayaran, berubah mengering menjadi daratan. Kini, kita mengenalnya sebagai Lembah Palu.

Peristiwa-peristiwa gempa ini menjadi penanda kondisi rawan bencana di Pulau Sulawesi yang menjadi wilayah pertemuan tiga lempeng yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia. Tekanan pertemuan lempeng-lempeng tersebut membuat aktif banyak sesar di Sulawesi. Kondisi geologis Pulau Sulawesi menjadi begitu kompleks. Sekurangnya terdapat 20 sesar yang melewati Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Sesar Palu-Koro, merupakan salah satu sesar besar di Indonesia. Sesar Palu-Koro yang menjadi pusat gempa 2018 adalah salah satu yang paling aktif. Sesar ini bergerak sekitar 4-5 mm tiap tahun dan memiliki lima segmen: Segmen Palu, Saluki, Moa, Graben dan Meloi. Sesar Palu-Koro memanjang mulai dari Perairan Laut Sulawesi (Selat Makassar) sampai pantai utara Teluk Bone, dengan dimensi panjang 500 km. Pada bagian darat sesar Palu-Koro memiliki dimensi panjang sekitar 250 km, mulai Teluk Palu sampai dengan pantai utara Teluk Bone (Sururoh, 2020).

“Oleh karena itu, kami mulai menggali pengetahuan lokal dan memproduksi pengetahuan tentang kebencanaan. Kami menggunakan bermacam metode. Festival Danau Lindu adalah salah satu cara mengingat dan memproduksi pengetahuan tentang kebencanaan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Henri Kusuma.



PELABUHAN TANJUNG BATU - Sejumlah kapal nelayan tertambat di sekitar pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Donggala (21/6/2014).

Kerugian, Dampak, dan Korban

Gempa dan tsunami ini menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Pemerintah Sulawesi mandata 4.402 warga hilang dan meninggal, 172.999 warga mengungsi. Rumah yang hancur dan rusak mencapai 100.405 unit rumah (Laporan Finalisasi Data dan Informasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi PADAGIMO di Sulawesi Tengah Per Tanggal 30 Jan 2019. Pemerintah Sulawesi Tengah). Kerugian material yang diderita sebesar Rp. 2,89 triliun rupiah dan dampak kerusakan sebesar 15,58 triliun rupian (Lien Sururoh, 2020)

Dokumen Project Operation Manual (POM) Kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), 2019 - 2024, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat ada lebih dari 50.000 orang yang harus mengungsi akibat gempa dan tsunami. Bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur utama dan ribuan fasilitas umum dan sosial di Kota Palu dan sekitarnya. BNPB dan UNDP memprediksi total kerusakan dan kerugian termasuk di sektor permukiman, infrastruktur, sosial, dan ekonomi mencapai18,48 triliun rupiah.





MENCARI SISA KORBAN - Tim SAR gabungan berada di lokasi likuifaksi Balaroa untuk mencari sisa korban yang tertimbun material bangunan pasca gempabumi dan likuifaksi di pemukiman padat penduduk Kelurahan Balaroa, Kota Palu (3/10/2018).



FASILITAS PENDIDIKAN RUSAK BERAT - Salah satu bangunan Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi turut rusak akibat diguncang gempa bumi (30/9/2018).



Gempa dengan likuifaksi ini memang tidak banyak terjadi di tempat lain. Kondisi geologis Sulawesi memang unik dan memungkinkan terjadinya likuifaksi setelah gempa. Gempa yang bepusat di Sesar Palu-Karo ini telah memicu dan melahirkan bencana berikutnya berupa tsunami dan likuifaksi. Sesar Palu-Koro merupakan sesar utama di pulau Sulawesi yang memanjang dari Sulawesi bagian tengah hingga Selat Karimata. Sesar Palu-Koro dibagi menjadi empat segmen Sesar, yaitu Segmen Selat Makassar, Mou, Saluki, dan Moa. Sesar Palu-Koro ini merupakan patahan yang membelah Pulau Sulawesi mulai dari batas Perairan Sulawesi dengan Selat Makassar hingga Teluk Bone. Sesar besar ini melintasi Kota Palu hingga daerah Sungai Koro. Itulah kenapa ia dinamai Sesar Palu-Koro (Andri Irfan Rifai et al, 2022).



EVAKUSI KORBAN - Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban gempabumi dan likuifaksi yang ditemukan di lokasi likuifaksi pemukiman padat penduduk Kelurahan Balaroa, Kota Palu (3/10/2018).

Ada 4 area dengan pengaruh likuifaksi terbesar, yaitu Petobo, Balaroa, Jono Oge dan Sibalaya. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Sigi 2019-2020 mencatat sebaran wilayah terdampak likuifasi adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah Mpanau (Sigi) – Petobo (Palu). Catatan dari LAPAN memperkirakan bahwa total wilayah terdapak likuifaksi di wilayah Petobo ini mencapai 175,64 Ha, sedangkan total bangunan yang terdampak adalah 2.283. Sejumlah 2.059 bangunan rusak, sementara 224 bangunan lainnya masuk dalam kategori sebagai bangunan yang "kemungkinan rusak." Kedua, wilayah Sidera, Jono-Oge. Di Sidera area seluas 202,1 hektar mengalami likuifaksi hingga terdapat 689 bangunan yang terdampak bencana likuifaksi tersebut. Bangunan rusak sebanyak 412 dan 277 bangunan "kemungkinan rusak." Ketiga, wilayah Lolu. Desa Lolu, Kecamatan Bimomaru adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak parah.





Sekitar 264,99 hektar area dengan 211 bangunan yang terdampak. Keempat, wilayah Sibalaya di Kecamatan Tanambulava. Di Silabaya diperkirakan sekitar 52,98 ha dengan total bangunan terdampak adalah 125 bangunan.

MENCARI SISA KORBAN - Tim SAR gabungan berada di lokasi likuifaksi Petobo untuk mencari sisa korban yang tertimbun material bangunan pasca gempabumi dan likuifaksi di pemukiman padat penduduk Kelurahan Petobo, Kota Palu (3/10/ 2018).



PENCARIAN KORBAN LIKUIFAKSI PETOBO - Salah satu petugas SAR sedang melakukan pencarian korban di area Likuifaksi Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (29/9/2018).





PENCARIAN JENAZAH KORBAN LIKUIFAKSI - Foto udara memperlihatkan dua alat berat menggali tanah untuk membantu pencarian jenazah korban yang tertimbun tanah di lokasi likuifaksi Petobo di Kelurahan Petobo, Kota Palu (3/10/2018).



FASILITAS IBADAH RUSAK BERAT - Gempa merusak beberapa fasilitas Rumah Ibadah, salah satu yang terdampak adalah bangunan Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID) Jemaat Ebenhezer yang terletak di Jalan Garuda, Kota Palu (30/9/2018).



Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab diantaranya melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, penunjang perekonomian, dan prasarana dasar; mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus mendampingi dan mengawasi pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swadaya oleh masyarakat maupun kontraktual.

Data ketika Bencana

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Singgih B. Prasetyo menceritakan bagaimana jajarannya mulai mengumpulkan data korban sejak dua hari pascabencana. “Pegawai-pegawai Dinas PU Kota Palu mengumpulkan data dari pagi hingga sore. Malam harinya, mereka mengurusi keluarga yang juga merupakan Warga Terdampak Bencana (WTB). Bisa dibayangkan bagaimana kondisi dan beban kejiwaannya. Maka saya bisa memahami ketika masa awal rehabilitasi dan rekonstruksi, data belum solid benar.” Sebagai contoh, pada awal penetapan, jumlah WTB vang akan ditangani oleh Kementerian PUPR berjumlah 8.788 KK. Jumlah ini kemudian berkurang menjadi 5.271 KK pada tanggal 19 Mei 2022. Penurunan jumlah ini diakibatkan karena banvak dari WTB yang terdata tidak sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah No. 360 Tahun 2019 tentang Kriteria Penerima Bantuan Huntap.



Gempa Bumi 2018 di Sulawesi



SALING MEMBANTU DALAM BINGKAI KEMANUSIAN - Salah satu kelompok relawan kemanusian sedang menyalurkan paket bantuan berupa sembako kepada WTB (1/10/2018).



MENGUNGSI KELUAR PALU - Sejumlah warga membawa barang seadanya untuk mengungsi keluar Palu dengan menumpangi Pesawat Hercules di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kota Palu (6/10/ 2018).





PEMBAGIAN BANTUAN - Para personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah sedang berjibaku menyalurkan bantuan bagi WTB yang terdiri dari sembako, kebutuhan khusus balita dan kebutuhan khusus wanita di halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Prof. Moh. Yamin, Kota Palu (1/10/2018).

Lain lagi cerita Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Henri Kusuma yang mendapati WTB bepindah dari data calon penerima dana stimulan ke data calon penerima Huntap setelah melihat hasil pembangunan Huntap melebihi ekspektasi. Tentu perpindahan data semacam ini tidak mudah sebab calon penerima Huntap harus memenuhi kriteria tertentu.

Melalui Technical Mission Bank Dunia yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022, Kementerian PUPR meminta pemerintah daerah memastikan kembali jumlah WTB vang diusulkan untuk mendapat bantuan Huntap. Maka pada 18 Agustus 2022, pemerintah daerah bersama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II membuat revisi jumlah calon penerima Huntap PUPR menjadi 5.772 KK. Namun jumlah ini pun juga mengalami perubahan dalam proses verifikasi vang dilakukan oleh Oversight Service Provider Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (OSP CSRRP). Akhirnya, pada Juli 2023, jumlah WTB yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR berubah menjadi 5.598 KK.


GREAT



SAKSI KEDAHSYATAN BENCANA - Salah seorang pria paruh baya, WTB Likuifaksi yang menggantung Jam dinding di lehernya. Jam dinding tersebut adalah salah satu barang yang tersisa dari puing-puing bangunan rumah yang luluh lantak serta menelan banyak korban jiwa akibat fenomena Likuifaksi di Perumahan Balaroa, Kota Palu (23/11/2018).



TINJAU LIKUIFAKSI PETOBO - Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat meninjau lokasi likuifaksi Petobo di Kelurahan Petobo, Kota Palu (3/10/ 2018).

Bangkit Bersama: Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada 1 Oktober 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah memobilisasi personil dan alat berat untuk evakuasi korban bencana, menyediakan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, membersihkan kota dari puing-puing bangunan runtuh, serta mulai menyelesaikan masalah konektivitas."Kita harus bisa merasakan apa yang masyarakat rasakan," begitu perintahnya untuk mengejawantahkan operasi kemanusiaan pascabencana Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong serta wilayah sekitarnya.



Operasi kemanusiaan bukanlah isapan jempol belaka. Kita bisa membuka jejak-jejaknya melalui cerita makanan dan tempat menginap yang disediakan oleh warga sepanjang jalan menuju Makasar ketika ribuan WTB mengungsi; Kita juga masih bisa mencium harumnya seduhan kopi panas oleh gerakan "teman bantu teman"' untuk para pekerja yang tidak kenal lelah memperbaiki aliran listrik yang porak-poranda; Atau aparatur pemerintah kabupaten dan kota yang sigap membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang responsif terhadap kondisi lapangan; Atau LSM-LSM yang menggerakkan jejaringnya, sehinggga ikut bergetar



dan peduli; Atau kita bisa mengintip dapur rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui WhatsApp Group (WAG) BP2P Sulawesi II. “Pak Dirjen selalu menekankan bahwa kerja rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai operasi kemanusiaan. Makanya, semua harus dikerjakan dengan cepat dan sesuai standar. Bahkan, beliau ikut masuk ke dalam WA Group. Beliau tidak hanya mengomentari, namun hingga me*mention* nama-nama ketika memantau dan ikut memecahkan persoalan,” begitu pengakuan Direktur Rumah Khusus (Dirsus) Direktorat Jenderal Perumahan PUPR, Yusniewati Ismail.



TENDA SEMENTARA - Seorang warga korban bencana memasak di depan tenda penampungan sementara yang mulai rusak di Kelurahan Lere, Kota Palu (19/3/2019).



Sebelum Relokasi

Gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami dan likuifaksi tersebut mengakibatkan banyak area dikategorikan sebagai zona merah alias tidak lagi bisa dihuni oleh masyarakat. Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi di banyak wilayah tidak bisa dilakukan di lokasi tempat mereka tinggal sebelumnya: WTB harus direlokasi. Namun sebelum direlokasi ke Hunian Tetap (Huntap), WTB menempati Hunian Sementara (Huntara). Pada masa inilah, WTB mengalami bencana tambahan yang tidak kalah beratnya. Bencana longsor dan banjir menyusul di beberapa daerah. Belum juga kembali kehidupan dan penghidupan, WTB dihantam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional pada awal tahun 2020. Sementara, Huntap yang dijanjikan belum kunjung terwujud.



HIDUP DI HUNTARA - Seorang WTB tsunami beraktivitas di dalam Huntara Lere di Kelurahan Lere, Kota Palu (7/12/2021).



Semua pihak sepakat bahwa pembangunan Huntap memang berjalan lambat dari yang direncanakan. Dilihat dari prosesnya, warga memang terlibat sejak awal, mulai dari pendataan hingga pembentukan Tim Pemantau Pembangunan (TPP), dari perwakilan warga yang ingin mengawasi pembangunan.

Dua tahun bencana, Huntap belum terwujud secara penuh. Di titik ini, para fasilitator mendata bahwa WTB sudah mencapai kejenuhan, merasa hanya diberi janji tanpa bukti. Sebagian warga akhirnya harus tetap tinggal di Huntara meskipun kondisinya mulai memprihatinkan.


WORKSHOP
Keberlanjutan
Sulawesi Teng
TAHUN ANGGARAN 2024


Pemulihan
ah Pascabencana
Aston Hotel Palu & Conference Center
Senin s.d. Selasa
25 – 26 November 2024

Meskipun telah dibuat rencana yang mapan namun berbagai masalah muncul dan menghambat kelancaran pelaksanaannya. Proyek pembangunan, misalnya, tidak bisa langsung dimulai karena belum ada fasilitator atau persiapan teknis lainnya. Dari sisi bangunan, model rumah Risha yang menggunakan panel modular, mengalami masalah karena pemasok panel belum siap menyediakan bahan, tenaga kerja, atau panel yang sesuai standar. Banyak masalah muncul karena tenaga kerja lokal masih sibuk, sehingga harus menunggu tukang dari daerah lain.

Di sisi lain, tidak mudah juga melakukan pendataan WTB calon penerima Huntap dengan skala yang sedemikian besar. Data yang bergerak dinamis dan berubah-ubah. Penyediaan lahan yang kerap kali memunculkan fakta sengketa padahal salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lahan harus jelas dan tidak boleh ada masalah.









HUNTARA PETOBO - Sejumlah warga berkumpul di depan salah satu Huntara WTB di Kelurahan Petobo, Kota Palu (19/9/2023).



Ketika masalah lahan bisa diurai, meski memakan waktu lama, proses pembangunan bisa dimulai dengan cepat. Selama masa pembangunan, warga didampingi oleh fasilitator. Mulai awal hingga hunian telah jadi. Upaya pendampingan ini terutama menyangkut adaptasi mereka dalam menjalani kehidupan di lokasi baru yang jauh berbeda dengan lokasi mereka terdahulu. Proses pendampingan yang juga penuh dinamika itu pada akhirnya bisa mempercepat proses pembangunan huntap. "Saya hanya menempatkan diri sebagai warga terampak bencana yang sudah tinggal di Huntara lebih dari 1 tahun. Kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, tinggal berdempetan dengan keluarga lain. Saya tidak bisa membayangkan jika ada orang memilih mempelambat pembangunan Huntap. Mengerjakan dengan tidak sesuai standar. Di mana hati nuraninya? Janganlah menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sebagai proyek. Tempatkanlah diri kita sebagai bagian dari WTB," Kepala Satuan kerja, Zulfahmi mengatakan sambil matanya berkaca-kaca. "Setiap kali melihat WTB di Huntara, semangat saya selalu naik. Pokoknya harus cepat. Huntap jadi, langsung huni - Huntap jadi, langsung huni. Saya sempat diperingatkan oleh Jakarta karena hal ini, menempatkan WTB meskipun sarana dan prasarana belum selesai. Tetapi ketika Jakarta melihat kondisi WTB di Huntara, tidak ada pilihan lain selain pindah ke Huntap dengan cepat. Sebab Huntara sudah mulai tidak layak huni. Misalnya, ada beberapa Huntara kena banjir rob, air masuk hingga ke dalam sehinggga tidak bisa ditempati".

Begitu juga pengakuan Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Henri Kusuma Rombe "Murni alasan kemanusiaan. Di Kabupaten Sigi, ada Huntara menempati tanah sewaaan yang telah melewati batas waktu. Sehingga WTB memindahkan Huntara kembali ke zona merah. Jika hujan, air masuk Huntara. Maka daripada tinggal di Huntara, kita geser ke Huntap menggunakan truk."


PRAKTIK BAIK
PROSES PENYEDIAAN
HUNIAN TETAP
PASCABENCANA
DI SULAWESI TENGAH


TAHUN
rrp.kemenpupr
FIRMAN

Tantangan Membangun Kembali yang Lebih Baik

Secara umum penyediaan Huntap di Sulawesi Tengah bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bantuan stimulan pembangunan Huntap oleh pemerintah dan pembangunan Huntap oleh lembaga atau organisasi non pemerintah. Bantuan stimulan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR meliputi penyediaan Huntap berupa rumah tahan gempa yang dilengkapi dengan infrastruktur permukiman seperti sarana jalan, air, dan listrik.



Berdasarkan skala dan skema penanganannya, Huntap bagi WTB dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, Huntap Skala Besar. Ini merupakan relokasi WTB ke lokasi hunian dengan skala lokasi luas dan akan dilengkapi dengan infrastruktur permukiman. Skema pembangunan Huntap di kawasan ini dilakukan oleh



kontraktor. Pada area tersebut dapat disediakan infrastruktur permukiman, seperti: air bersih, pengelolaan air limbah domestik, sistem drainase, persampahan, serta fasilitas umum. Kedua, Huntap Skala Menengah yaitu relokasi WTB ke hunian dengan luasan yang relatif lebih kecil dan tersebar. Pada area tersebut akan disediakan infrastruktur minimum dengan menyesuaikan kondisi. Skema pembangunan Huntap di kawasan ini dilakukan melalui kontraktor. Ketiga, Huntap Skala Kecil (Mandiri). Ini adalah model relokasi warga ke tempat hunian yang diusulkan sendiri oleh warga dengan kepemilikan tanahnya sendiri yang lokasinya berada di zona pengembangan. Pembangunan akan dilakukan oleh kontraktor (secara swadaya) dengan didampingi oleh fasilitator.

WTB yang mendapat manfaat Huntap ditetapkan melalui SK Bupati /Walikota dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, WTB yang kehilangan rumah karena tsunami, likuifaksi, atau memiliki rumah satu-satunya di zona merah. Kedua, WTB memiliki keterbatasan dalam upaya membangun kembali baik dari sisi lokasi, tenaga, dan material bangunan. Ketiga, WTB bersedia pindah ke lokasi yang lebih aman dan tidak akan membangun kembali di lokasi asal.

Pembangunan Huntap hanya dapat dilakukan di lokasi yang termasuk ke dalam zona pengembangan, bukan di zona merah atau zona rawan bencana. Peta Zona Rawan Bencana disusun berdasarkan risiko dan kerawanannya. Peta terserbut membagi lahan menjadi empat zona yaitu: Zona 1 untuk pengembangan; Zona 2 untuk pengembangan bersyarat; Zona 3 untuk pengembangan terbatas, dan Zona 4 untuk larangan pengembangan. Warga yang sebelumnya tinggal di rumah atau bangunan yang berada di Zona 4 (berbahaya tinggi) dipindahkan ke tempat yang lebih aman sebagai upaya mitigasi risiko bencana di masa yang akan datang. Status kepemilikan tanah pada lokasi hunian sebelumnya tidak berubah, namun tidak boleh didirikan bangunan sebagai hunian, bangunan usaha, dan bangunan dengan fungsi lainnya.

Secara teoritik, pembangunan Huntap akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi dan identifikasi serta pemetaan penerima manfaat. Kedua, pengadaan dan serah terima lahan. Ketiga, perencanaan perumahan dan permukiman. Keempat, pelaksanaan konstruksi. Kelima, operasi dan pemeliharaan. Kelima tahapan tersebut tentu saja dilakukan setelah jumlah kebutuhan dan lokasi teridentifikasi.





Namun pada praktiknya, proses tersebut tidak semulus yang direncanakan. Dalam setiap tahapan selalu muncul hambatan dan tantangan. Proses pendataan warga beserta kerugiannya membutuhkan waktu yang tidak pendek. Pengadaan lahan juga menjadi tantangan terbesar yang membutuhkan waktu untuk diurai.





Penyediaan lahan untuk relokasi dan pengembangan Huntap memerlukan waktu lama terkait proses pengalihan status lahan serta penyelesaian masalah klaim masyarakat. Syarat lokasi hunian yang dapat diajukan oleh pemerintah daerah sangat ketat, yakni mempunyai status kepemilikan lahan jelas, bebas dari sengketa apa pun, serta terverifikasi aman dari sisi zonasi rawan bencana.



Di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, warga secara swadaya menyediakan tanah untuk membangun rumah, menggantikan hunian lama yang kerap terendam air laut pasang. Di Talise Panau, 12 warga merelakan tanah mereka untuk dibeli Pemerintah Kota Palu agar menjadi lokasi Huntap bagi warga di zona rawan bencana. Program Huntap Mandiri juga menunjukkan bagaimana warga secara sukarela menghibahkan tanah mereka demi tetangga yang membutuhkan hunian layak. Bahkan, Pemerintah Desa di Sigi merelakan tanah kas desa untuk digunakan sebagai lokasi hunian tetap, sambil menunggu proses penggantian tanah dari pemerintah daerah. Kisah-kisah ini memperlihatkan betapa kuatnya semangat gotong royong dan solidaritas dalam membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi WTB.

Membangun kembali kehidupan lama tentu saja bukan perkara gampang. Terlebih ini adalah pemulihan dengan skala yang sangat besar, termasuk yang terbesar dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Skala yang begitu besar, beserta kerumitan dan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam proses pemulihan membuat pelaksanaan tidak selalu simetris dengan perencanaan. Hingga dua tahun setelah bencana, misalnya, Huntap untuk WTB hanya tersedia sepertiga dari yang dibutuhkan. Laporan Monitoring Penyediaan Hunian Tetap NSUP-CERC/ CSRRP di Sulawesi Tengah. Tim Monitoring Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah mencatat pada tahun 2000 baru sekitar 2.882 unit yang sudah dibangun dari kebutuhan yang direncanakan. Laporan ini juga mandata sejumlah kendala seperti lahan untuk Huntap yang belum sepenuhnya bersih dan jelas, data calon penerima hunian tetap yang masih belum rampung, dan masih banyak masyarakat yang menolak untuk direlokasi ke lokasi yang ditetapkan pemerintah.



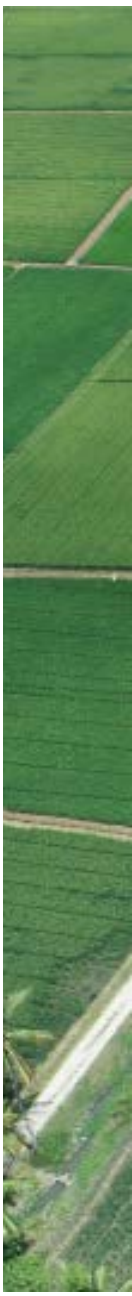





ZULFAHMI
DJP


YUSNIE

Menata Harapan Baru di Hunian Tetap



Bagi sebagian besar WTB, kehadiran negara kini terasa nyata. Harapan-harapan baru mulai tumbuh seiring proses menata diri dalam ruang sosial di Huntap. Setelah lebih dari lima tahun menjalani perpindahan yang tidak mudah, warga perlahan menemukan ketenangan.

"Sudah enak, sudah tenang sedikit. Jalan dikasih baik, air lancar, lampu diperhatikan, ya bersyukurlah, tidak menyangka," ungkap Mappi dari Loli Pesuwa, pernyataan yang diamini oleh banyak warga lainnya. Mirwan, tetua adat di Tompe yang kini berusia 56 tahun, juga mengungkapkan keterkejutannya melihat perubahan besar di tempat tinggalnya. "Tidak pernah mengira bahwa wilayah ini menjadi kota kecil yang ramai seperti sekarang," ujarnya. Huntap yang diperjuangkan warga bersama negara tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga infrastruktur seperti jalan yang diperlebar dan diperkeras, serta fasilitas pendukung lainnya. Penataan permukiman ini menciptakan ruang-ruang bersama seperti jalan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan tempat pertemuan, yang menjadi pusat aktivitas komunitas.

Pengelolaan Huntap, terutama dalam skala besar yang mempertemukan warga dari berbagai desa, memerlukan peran penting fasilitator. Di berbagai permukiman, fasilitator membantu warga mengatur pengoperasian dan pemeliharaan air bersih serta pengelolaan sampah.




YUSNIE



Selain itu, fasilitator mendorong terbukanya ruang bagi warga pendatang untuk berbaur dengan warga lokal. Melalui pertemuan yang diselingi canda dan tawa, tercipta ikatan yang mempercepat penyatuan komunitas dalam mengelola kebutuhan dasar seperti air bersih dan kebersihan lingkungan.

Perjalanan panjang ini memberi pelajaran beharga tentang pentingnya kolaborasi antara masyarakat, fasilitator, dan pemerintah. Menata kawasan bukan saja menata fisik, namun juga menata komunitas yang tangguh, menata harapan baru. Warga tidak hanya memiliki tempat tinggal baru, tetapi juga harapan akan kehidupan yang lebih baik.





PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN - Salah seorang anak sedang mengamati Alat-alat berat bekerja mengeruk tanah sisa Likuifaksi yang menimbun salah satu Sekolah dasar di Desa Langaleso, Kabupaten Sigi. Beberapa alat berat dikerahkan oleh pemerintah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dasar pasca bencana yang melanda beberapa wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah (30/9/2018).



Proses
Residensi
dan
Festival

Membangun Harapan Baru dengan Risha

Rumah-rumah itu dikenal dengan sebutan Risha, singkatan dari Rumah Instan Sederhana Sehat, sebuah konsep pembangunan rumah pascabencana. Baik secara bentuk bangunan maupun proses pembangunannya, Risha memiliki model yang berbeda dengan rumah-rumah rekonstruksi pascabencana lainnya. Dalam hal proses, metode pembangunan Risha adalah di luar lokasi, artinya konstruksi dibuat dan dibangun tidak di lokasi. Dia dibawa ke lokasi dalam wujud konstruksi yang sudah jadi. Maksudnya, proses pembuatan elemen, komponen, atau modul bangunan dibuat terlebih dulu sebelum dipasang di lokasi konstruksi.



Deretan rumah terhampar rapi, dengan tanaman-tanaman mungil di sekitarnya, tampak berdiri kokoh dalam permukiman baru. Rumah-rumah baru itu dihuni oleh WTB gempa bumi di Sulawesi Tengah 2018 silam. Secara sekilas, tidak tampak ada yang istimewa dari rumah-rumah itu, terlihat seperti permukiman penduduk pada umumnya. Namun jika diperhatikan dengan seksama, orang akan mengenali sejumlah detail yang berbeda.

Huntap-huntap tersebut tidak berdiri sendiri. Sebagai permukiman warga tentu terdapat ruang-ruang publik tempat berinteraksi dan bersosialisasi. Fasilitas di permukiman ini meliputi akses jalan yang lengkap dengan saluran drainase di dua sisi, saluran buangan dari masing-masing rumah, serta jalur pedestrian yang berada di tiap sisi jalan lengkap dengan lampu penerangannya. Kawasan permukiman ini dilengkapi dengan ruang terbuka hijau dan ruang publik bagi para penghuni Huntap.

Rumah Sederhana yang Tahan Gempa

Paling penting dari pembangunan Risha adalah prinsip tahan gempa. Dengan demikian, sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Tahan gempa bukan berarti rumah yang dibangun sama sekali tidak akan rusak jika gempa terjadi namun merupakan rumah yang dibangun dengan prinsip pengurangan risiko bencana. Pada prinsipnya, rumah tahan gempa tidak akan mengalami kerusakan, baik pada komponen non-struktural maupun pada komponen strukturalnya, manakala terjadi gempa ringan. Adapun contoh komponen non-struktural adalah genting, dinding, atau kaca. Sementara komponen strukturalnya antara lain: pondasi, beton, dan balok. Bila terjadi gempa sedang, bangunan mengalami kerusakan pada elemen non-strukturalnya, akan tetapi elemen strukturalnya tidak boleh rusak. Sementara manakala terjadi gempa besar, bangunan mengalami kerusakan, baik pada elemen struktural maupun non-strukturalnya, namun tidak langsung roboh sehingga penghuni masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Itulah yang dimaksud dengan rumah tahan gempa.

Pada dasarnya, pembangunan rumah tahan gempa adalah ikhtiar untuk membuat seluruh elemen rumah menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu. Masing-masing elemen menyatu sehingga tidak lepas/runtuh akibat gempa karena beban ditanggung dan disalurkan secara bersama-sama secara proposional.





Selain menerapkan cara membuat sambungan yang cukup kuat antar elemen, memperhatikan bahan bangunan juga sangat penting. Bahan bangunan yang baik dan mutu yang sesuai persyaratan harus bisa dipenuhi. Dalam proses pembangunan Huntap untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bahan bangunan harus memenuhi semua persyaratan keamanan dan keselamatan pengguna bangunan serta sesuai standar teknis SNI (Standar Nasional Indonesia). Jika belum diatur dalam SNI, maka bahan bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan teknis yang sepadan. Sementara untuk bahan bangunan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, prosesnya juga harus sesuai dengan standar baku.

Lebih Dekat dengan Risha



Secara bentuk, Risha memiliki spesifikasi yang berbeda dengan rumah hunian pada umumnya. Struktur Risha dibangun dari panel beton pracetak yang terdiri dari tiga jenis panel berbeda dan dipasang hanya dengan menggunakan sistem mur dan baut. Struktur kolomnya juga dibuat secara khusus sehingga bisa dikerjakan oleh tenaga atau tukang yang sudah terlatih atau yang sudah berpengalaman membangun Risha.

Di Huntap Duyu, misalnya, luasan lahan setiap unit adalah 10m x 15m. Sisa lahan digunakan untuk dapur atau ruang lain. Halaman depan rumah dilengkapi



HUNTAP DUYU - Seorang pekerja melintas di Huntap, Kelurahan Duyu, Kota Palu, (22/9/2020).

TERIMA HUNTAP - Seorang penyintas berdiri di depan Huntap yang diterimanya di Kelurahan Duyu, Kota Palu (26/ 7/ 2021).





dengan bak sampah dan meteran air yang terintegrasi langsung dengan tandon air yang berada di belakang rumah. Bangunan utama berukuran 6m x 6m. Ruang tamu atau ruang keluarga berukuran 3m x 6m. Sementara dua kamar tidur, masing-masing berukuran 3m x 3m. Di luar bangunan utama terdapat kamar mandi dengan ukuran 1,5m x 1,5m.

Bagian depan bangunan diplester dan dicat. Semua kusen dan daun jendela menggunakan aluminium, kecuali untuk pintu depan, pintu belakang, dan pintu kamar yang terbuat dari *plywood*. Lantai rumah berupa beton yang di bagian atasnya dilapisi acian semen. Dinding rumah menggunakan batako dilengkapi instalasi listrik untuk saklar dan stop kontak di setiap ruangan. Listrik di rumah Risha ini berdaya 900 Watt, dengan enam buah titik lampu yang masing-masing ditempatkan di depan pintu luar, di kamar depan dan kamar belakang, dua lampu di ruang tamu/ ruang keluarga, dan di kamar mandi. Plafon atas menggunakan bahan gypsum dan rangka baja ringan. Sementara atapnya berupa spandek pasir dan reng baja ringan sebagai rangkanya.

Teknologi konstruksi *knock-down* yang dipunyai Risha ini membuatnya fleksibel dan bisa dibangun dalam waktu yang cukup cepat. Istilah instan dalam nama Risha sendiri sudah menunjukkan kecepatan itu. Dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya, rumah Risha mempunyai tiga buah panel. Masing-masing panel memiliki berat tidak lebih dari 47kg. Dengan bobot seperti itu, panel bisa diangkat oleh satu orang saja dan tidak memperlukan peralatan lebih. Rangka yang dipersyaratkan adalah rangka baja tulangan berdiameter 8 mm dan 6 mm, dengan menggunakan sambungan kering mur, baut, dan plat 3 mm.



Proses pembangunan Risha terdiri dari dua tahap. Pertama adalah pembuatan komponen dan yang kedua adalah pemasangan di lokasi. Kedua proses ini bisa berlangsung secara simultan. Pada saat di lokasi tengah disiapkan persiapan lahan, maka di saat yang sama infrastruktur komponen-komponen rumah dibuat di bengkel. Dilihat dari komponen strukturalnya, rumah Risha terdiri dari tiga komponen struktural utama. Komponen struktural adalah komponen yang mendukung berdirinya bangunan atau rumah tinggal. Tanpa komponen ini bangunan rumah tidak bisa berdiri. Jika komponen struktural dihilangkan, bangunan atau rumah akan mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Komponen struktural terdiri dari tiga panel, yaitu panel struktural tipe 1, panel struktural tipe 2, dan panel struktural tipe 3 atau panel simpul. Ketiga panel Risha tersebut merupakan bagian dari sistem rangka. Sistem strukturnya menggunakan sistem modul yang terbentuk dari









rakitan komponen-komponennya. Dengan demikian ruang-ruang di dalam rumah nantinya akan berdimensi sesuai modul pembentuknya. Dengan kata lain, pilihan desain ruang memang harus dipilih sejak awal.

Paparan singkat di atas setidaknya menunjukkan bahwa Risha memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, dengan menggunakan sistem *knock-down*, Risha dapat mengakomodasi konsep rumah tumbuh di mana pembangunannya dilakukan secara bertahap. Kedua, tanpa perlunya pengecoran di lokasi, pembangunan struktur rumah dapat dilakukan dengan relatif singkat. Semua sambungan menggunakan baut dan plat sehingga cepat pemasangannya, sekaligus murah. Ketiga, tidak banyak tenaga kerja yang diperlukan ketika memasang Risha. Cukup 6 orang tenaga berpengalaman sudah mampu merakit rumah Risha ini. Keempat, dengan adanya ukuran atau standar yang pasti dan proses produksi yang terkonsentrasi, mutu dan kemudahan

PEMBANGUNAN HUNTAP - Pekerja menyelesaikan pembangunan Huntap Tondo di Kelurahan Tondo, Kota Palu (7/10/ 2019).









prosesnya menjadi lebih terjamin. Meskipun dibuat secara massal, mutu bangunannya akan sama. Kelima, teknologi ini hanya mengkonsumsi sekitar 60% bahan bangunan dibandingkan dengan teknologi konvensional. Dengan demikian, dari kacamata keberlanjutan, teknologi ini dapat dikatakan lebih ramah lingkungan, yakni: hemat sumber daya alam, energi, pemeliharaan, dan hemat waktu. Keenam, hemat biaya bahan dan konstruksi karena hanya mengunakan pondasi setempat pada titik-titik tumpuan. Ketujuh, stuktur konstrusi Risha telah teruji terhadap resiko gempa. Kedelapan, Risha bisa didirikan di berbagai jenis lahan dengan penyesuaian pondasi.

Kekurangan yang bisa dicatat diantaranya adalah sifatnya yang kurang fleksibel dalam hal desain karena keterbatasan modul komponennya. Selain itu, konstruksi Risha terbatas sampai konstruksi rumah 2 lantai. Kendati demikian, kekurangan ini tidak

menutup sejumlah keunggulan yang telah dikemukakan di atas.

Dalam proses pembuatan dan pembangunan Risha terdiri dari sejumlah tahapan. Tahapan pelaksanaan terdiri dari pekerjaan persiapan meliputi mempersiapkan dan membersihkan lahan serta menetapkan batas-batas lahan, memasang *bouwplank* dan menentukan batas galian. Selanjutnya adalah membuat pondasi dengan menggunakan pondasi setempat pada titik-titik tumpuan. Setelah pondasi jadi, tahap berikutnya adalah memasang struktur rumah, memasang kuda-kuda yang dirakit ke atas ring balok, dan memasang atap. Tahap berikutnya adalah proses yang lazim dalam pembangunan rumah pada umumnya yaitu pemasangan kusen, dinding, dan finishing berupa plester, pengecatan serta pembersihan lingkungan sehingga rumah Risha dapat ditinggali.







BERMAIN DI HUNTAP - Sejumlah anak berlarian di jalan di Kompleks Huntap yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Duyu, Kota Palu (14/7/2021).




NTI

Konsolidasi dari Hati ke Hati

Kunci keberhasilan konsolidasi tanah, tidak lain, adalah pendekatan dari hati ke hati, kepada pemilik baik secara *de facto* maupun *de jure*. Dengan sukarela, akhirnya, mereka menyetujui konsolidasi tanah untuk tujuan kemanusiaan. Hingga anggaran ganti rugi yang telah tersedia tidak perlu dibayarkan, melainkan dialihkan untuk pembangunan fasilitas sosial dan akses jalan. Sebuah usaha panjang tidak kenal lelah telah membuahkan hasil: konsolidasi tanah di Huntap Petobo!

Hingga tulisan ini dibuat, konsolidasi tanah di Huntap Petobo tidak pernah selesai menjadi buah bibir. Bagaimana mungkin sertifikat tanah yang tumpang-tindih, penguasan tanah secara *de facto*, serta 'kesan keras' masyarakatnya seperti lumer, hanya menyisakan cerita keberhasilan, tidak hanya di tingkat kabupaten, bahkan nasional. Pihak Bank Dunia, Kementerian PUPR, bahkan Kementerian ATR/ BPN sendiri dibuat melongo. "Barangkali sudah jalan Tuhan...," begitu kata Fahrul, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Palu.

Fahrul bukan orang baru dalam konsolidasi lahan. Lebih dari 3 bulan, Ia yang semula bekerja di Kabupaten Tolitoli, mondar-mandir ke lokasi konsolidasi tanah setiap minggunya. Tidak jarang, uang pribadinya terpakai untuk transportasi dan biaya kopi ketika pertemuan dengan warga diselenggarakan. Hingga akhirnya, ia dipindahtugaskan di Kota Palu untuk memaksimalkan akselerasi dan capaian. "Konsolidasi tanah tidak mungkin selesai hanya dengan musyawarah di dalam ruangan. Saya memiliki keuntungan karena berasal dari Kelurahan Petobo sehingga mengenali karakter dan person-person kunci. Kita harus bicara dari hati ke hati dengan mereka untuk mendapatkan kesepahaman dalam beberapa kali pertemuan. Saya mengenal para pemilik sertifikat. Begitu juga, saya mengenal para penguasa tanah secara *de facto* dan warga terdampak bencana (WTB) yang adalah saudara-saudara saya," begitu Fahrul mengenang masa-masa awal terlibat dalam penyelesian masalah konsolidasi tanah. "Pada tahun 2021, anggaran hanya terserap 7% karena konsolidasi tanah belum menemukan jalannya. Tahun 2022, anggaran terserap 100%, bahkan kurang. Peruntukan anggaran sesungguhnya hanya untuk 500 sertifikat. Namun kenyataannya, kebutuhan anggaran lebih dari 1000 sertifikat."



PENYERAHAN KUNCI HUNTAP - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan) didampingi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Irwan Suprijanto (kanan) mengangkat tas berisi bahan pangan usai menyerahkan kunci Huntap Tondo II (14/6/2024).

Setiap kali konsolidasi tanah menemukan hambatan, selalu saja ditemukan jalan. Sebab semua orang melihat WTB yang sudah terlalu lama tinggal di Huntara, memerlukan Huntap sesegera mungkin. Seluruh tenaga, semangat, dan komitmen diarahkan ke sana.



Ada yang memberikan 100% tanahnya, alih-alih sesuai dengan komitmen awal konsolidasi tanah yang mensyaratkan 25% tanahnya diserahkan; Ada WTB yang menolak menerima Huntap karena komitmen mengutamakan WTB yang paling berhak menerima; Ada gerakan solidaritas kelompok yang mendesak pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk percepatan pembangunan Huntap; Ada sinergi antara kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa; Ada person-person yang gigih mencurahkan pikiran, tenaga, dan uangnya untuk menyelesaikan permasalahan konsolidasi tanah. “Tercapainya tujuan ini berkat kolaborasi yang kita bangun antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap apa yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan, supaya warga penyintas cepat mendapat hunian yang layak ditempati,” demikian kata Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid ketika menyerahkan lahan Huntap Kelurahan Petobo.











Gotong-royong dan Solidaritas

Mulanya, Kelurahan Petobo tidak masuk dalam penetapan lokasi Huntap. Namun sebagian besar WTB tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya sehingga berbagai upaya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/372/DIS.BMPR-G.ST/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 369/516/DIS.BMPRG.ST/2018 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Konsolidasi tanah di Kelurahan Petobo terdiri dari desain bidang konsolidasi tanah dan desain bidang tanah Huntap. Sebanyak 428 bidang konsolidasi tanah dengan luas kurang lebih 35,7057 ha menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebanyak 33 bidang konsolidasi tanah dengan luas kurang lebih 12,0574 ha yang terdiri dari jalan, rumah ibadah, ruang terbuka non hijau, dan ruang terbuka hijau menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Palu. Sementara, lokasi Huntap merupakan tanah yang diserahkan oleh peserta konsolidasi tanah dengan kesepakatan penyerahan tanah 25% dengan luas total 14,2 ha, menjadi 655 SHM tanah Huntap. “Penyerahan sertifikat ini adalah bukti kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” begitu penyataan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ketika menyerahkan sertifikat kepada warga penghuni Huntap.

Pada banyak kasus, konsolidasi



PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Gubernur Sulteng Rusdy Mastura (kanan) memeriksa sertifikat tanah sebelum diserahkan kepada penyintas di kawasan Huntap Petobo (28/4/2024).



SERTIFIKAT TANAH - Seorang warga menunjukkan sertifikat hak milik tanah yang baru diterimanya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono di kawasan Huntap Petobo (28/4/2024).



tanah tidak berjalan karena akses jalan tidak segera dibangun. Namun di Kelurahan Petobo, bidang-bidang tanah peserta konsolidasi tanah yang semula tak ada harganya, menjadi bernilai tinggi karena semua bidang tanah memiliki akses pada jalan yang sudah mulai terbangun. Sementara, di sebelahnya, terdapat kawasan Huntap Petobo yang menggeliat, mulai menunjukkan daya hidupnya.

Perjuangan warga Petobo untuk mendapatkan hunian tetap di Kelurahan Petobo mencerminkan semangat partisipasi aktif dalam menentukan masa depan mereka, keluarga, dan wilayah tempat tinggal mereka. Mulanya, ketidakhadiran nama Petobo dalam Surat Keputusan Penunjukan Lokasi Hunian Tetap memicu kekecewaan dan kegelisahan di kalangan warga. Warga melakukan berbagai upaya untuk memastikan hunian tetap dibangun di Petobo. Mereka menggelar komunikasi intensif, melakukan mediasi, hingga berdemonstrasi. Sebagai alternatif, muncul tawaran untuk membangun hunian secara mandiri di lahan milik sendiri dengan skema kontraktual. Namun, tantangan besar muncul karena tidak banyak warga terdampak yang memiliki lahan pribadi untuk membangun hunian.

Dalam situasi sulit ini, upaya konsolidasi tanah menjadi solusi penting. Warga bersama pemerintah daerah bergerak cepat melakukan konsolidasi tanah.

Solidaritas warga dalam pengadaan tanah untuk hunian tetap pascabencana adalah cerita yang tidak bisa diabaikan. Kerelaan warga untuk melepaskan tanah demi sesama menjadi simbol kuat solidaritas dan mempererat kembali hubungan bertetangga.

Ketua perhimpunan peserta konsolidasi tanah, Gamaruddin G. Kadir (53) mengatakan bahwa kosolidasi tanah berhasil karena rasa kekeluargaan dan keikhlasan hati dari seluruh peserta konsolidasi tanah “Kami berharap, keluarga yang tinggal di Huntara dapat segera mendapat Huntap dan sertifikat”. Senada dengannya, Husaema (59) selaku penyumbang lahan terbesar dalam kegiatan konsolidasi tanah mengakui bahwa apa yang dilakukannya didasari atas keinginan membantu warga yang masih tinggal di Huntara. “Saya juga ingin kawasan di sana tertata. Sekarang lihat, dengan kegiatan konsolidasi tanah, jalan menjadi bagus. Kalau saya tidak ikut, belum tentu yang lain mau ikut. Dengan menjadi peserta konsolidasi tanah, saya bisa mengajak saudara-saudara lain untuk peduli terhadap mereka yang di Huntara”.





Upaya konsolidasi tanah ditempuh warga dan pemerintah daerah melalui proses yang penuh lika-liku, perjuangan, sekaligus pengorbanan. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan tekad kuat warga, tetapi juga menjadi bukti kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun masa depan yang lebih baik setelah bencana.



TINJAU LIKUIFAKSI BALAROA - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa Antonio Guterres (tiga dari kanan), Wakil Presiden M Jusuf Kalla (empat dari kanan), dan CEO World Bank Kristalina Georgieva (lima dari kanan) mengunjungi Kelurahan Balaroa, Kota Palu (12/ 10/ 2018).




KEEP CALM

Buah Kegigihan dan Kesabaran

Akhirnya, pembangunan Huntap mengalami percepatan pascabencana Covid 19. Capaian pembangunan 9.140 unit Huntap merujuk pada pendataan atas rumah rusak. Sebanyak 3.542 dibangun oleh NGO dan Pemda. Sedangkan sisanya, sebanyak 5.598 unit dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan. Dari jumlah yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini, pelaksanaannya dibiayai melalui dana CERC di dalam proyek NSUP sebanyak 1.679 unit, melalui dana CSRRP sebanyak 3.880 unit, serta melalui APBN sebanyak 39 unit, yang tersebar di 38 lokasi Huntap di Kota Palu, Sigi dan Donggala.

Tabel sebaran lokasi Huntap

No	KOTA/KABUPATEN	LOKASI HUNTAP	JUMLAH UNIT
1	Palu	Duyu	230
2	Palu	Mandiri	308
3	Palu	Balaroa	52
4	Palu	Talise	693
5	Palu	Petobo	655
6	Palu	Tondo2	961
7	Palu	Talise Mpanu	53
8	Palu	Lere (APBN)	39
Jumlah Palu			**2991**
9	Sigi	Lambara	62
10	Sigi	Pombewe	605
11	Sigi	Salua	63
12	Sigi	Sibalaya Selatan	118
13	Sigi	Bangga Dusun 2	146
14	Sigi	Bangga Dusun 1 & 3	141
15	Sigi	Sibalaya Utara	64
16	Sigi	Poi	25
17	Sigi	Rogo	14
Jumlah Sigi			**1238**

18	Donggala	Ganti	82
19	Donggala	Ganti 2	17
20	Donggala	Lompio	300
21	Donggala	Tanjung Padang 1	64
22	Donggala	Tanjung Padang 2	37
23	Donggala	Tanjung Padang 3	26
24	Donggala	Loli Tasiburi 1	27
25	Donggala	Loli Tasiburi 2	49
26	Donggala	Loli Dondo	53
27	Donggala	Loli Saluran	18
28	Donggala	Tompe 1	44
29	Donggala	Tompe 2	97
30	Donggala	Tompe 3	161
31	Donggala	Lende Ntovea 1	30
32	Donggala	Lende Ntovea 2	44
33	Donggala	Lende Ntovea 3	50
34	Donggala	Lende	68
35	Donggala	Wani 1	73
36	Donggala	Wani Lumbumpetigo	48
37	Donggala	Tondo (Sirenja)	35
38	Donggala	Ujumbou	46
Jumlah Donggala			**1369**
Total Jumlah Pasigala			***5.598***


SIBAL



“Kita tunggu, tunggu, tunggu,… kita gelisah, belum ada lokasi Huntap. Kemudian, kami mendapat informasi bahwa warga harus pindah ke wilayah Ganti. Mau bikin apa di sana? Jauh dari lahan mata pencarian. Kami protes hingga mendapat lokasi khusus. Boleh dikata, kami baru mulai ada bayangan mendapatkan Huntap pada tahun 2022”, ungkap Mappi (67 tahun) warga Loli Pesuwa, penghuni Huntap Loli Tasiburi 3. “Tak disangka, tak dikira, tidak sekedar rumah. Jalan dikasih baik, air lancar, lampu diperhatikan. Akhirnya kami bersyukur….”







Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bangkit Kembali Langaleso mendesak pindah ke Huntap Pombewe meskipun infrastruktur air, listrik, dan lingkungan belum tersedia. Sebab Huntara yang Mereka tempati sudah tidak layak ditinggali. Jika hujan pada malam hari, Mereka bisa tidur sambil berdiri. Huntara sudah tidak nyaman untuk tempat hidup, terutama bagi anak-anak, perempuan, lansia, serta anggota keluarga yang sakit. Di sisi lain, penghunian Huntap mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung.




A2 - 10

Lain halnya Tjindo (73 tahun) dari Desa Loli Saluran, Kabupaten Donggala yang merasa yakin bahwa negara tidak akan tinggal diam. Tjindo lebih sabar, mengikuti setiap tahapan pertemuan sampai waktunya pembangunan Huntap terlihat di lahan yang direncanakan. “Sekarang sudah senang, sudah tinggal di Huntap. Setelah bencana terjadi, bersama 13 keluarga mengungsi di rumah kebun. Hari berikutnya, gempa susulan memaksa kami naik ke gunung, tidur dengan alas seadanya. Kami tinggal di tenda lebih dari 8 bulan, kemudian pindah ke Huntara. Dan akhirnya, Huntap yang kami rindukan.”

“Kaya-miskin mendapatkan hak yang sama sebagai WTB. Negara memberikan bentuk rumah dan ukuran lahan yang sama kepada setiap WTB. Huntap ini memang bukan ganti rugi. Semua warga terdampak bencana sama di mata negara.” ulas Rahman (46 tahun) penghuni Huntap Petobo.









Mirwan (56 tahun), tetua adat di Tompe, menegaskan bahwa tidak pernah menyangka Tompe akan menjadi kota kecil. Huntap yang diperjuangkan bersama WTB tidak sekedar rumah tinggal, namun juga dibarengi dengan penataan permukiman, seperti jalan, ruang terbuka hijau, lapangan bulu tangkis/takraw, atau tempat pertemuan.

“Beruntung, sebelum Huntap selesai dibangun, musim Ikan Rono datang lebih dari seminggu. Setiap malam, kami bisa menyimpan 1 juta di kantong. Harga cengkeh juga cukup tinggi musim lalu. Selain itu, saya mendapat tambahan uang dari menjadi tukang, membantu pengerjaan Huntap. Semua uang, sekitar 40 juta, dibelanjakan bahan baku untuk pengembangan rumah. Setelah jadi baru ditinggali. Kondisi sudah lengkap. Ada dapur, pagar, dan tempat untuk duduk-duduk menjelang sore”, cerita Nurdin (42 tahun) penghuni Huntap Loli Tasiburi .







Dalam penentuan tanah calon Huntap dipilah skema partisipatif yang membuka ruang diskusi, negosiasi, serta saling mengerti. “Timbang dengan hati dan pikiran. Prioritas pertama adalah untuk janda, keluarga difabel, dan lansia. Setelahnya, kita rundingkan penentuan tapak yang akan mengumpulkan warga sesama RT, satu keluarga, atau dengan metode tarik lot (undian)” ungkap Kepala Desa Loli Pesuwa.

“Apakah Bapak dan Ibu tidak keberatan jika kami menyelenggarakan ibadah sembahyang di Huntap? Jika tidak berkeberatan, kami akan gabung. Semua sama”, begitu cerita ibu Yanti Donge (54 tahun) pengurus gereja di Sivalenta yang akan tinggal di Huntap Lende Ntovea mengenang ketika berembuk dengan calon tetangga di awal penentuan tapak Huntap. Mereka membayangkan hidup baru yang berbeda: hidup bersebelahan dengan jarak sangat dekat. Ragam tantangan dan harapan berpadu dalam menata kehidupan baru.









Geliat ekonomi Huntap diawali dari pemanfaatan ruang sekitar rumah. Menanam sayur-mayur di lahan tersisa, mendirikan warung, membuka jasa cuci pakaian atau jahit, menyediakan jasa air minum isi ulang, dan sejumlah aktivitas ekonomi informal lainnya. Lina (38 tahun) penghuni Huntap Loli Dondo misalnya memanfaatkan satu kamar untuk tempat produksi donat “Hasil dari jualan donat dipakai untuk tambahan jajan anak dan ditabung untuk membuat dapur.” terangnya. Fasilitator mendampingi warga dan geliat ekonomi di Huntap melalui fasilitasi jejaring kemitraan, penataan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, atau pelatihan pengelolaan keuangan, perencanaan bisnis dan penguatan kewirausahaan.




PRIME

Epilog

HUNTAP:
Adaptasi, Dinamika Sosial dan Ekonomi

Oleh:

Muhammad Marzuki & Muh. Zainuddin Badollahi

“Setiap fenomena budaya memiliki kisah yang mencerminkan identitas dan nilai suatu komunitas…”

Gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah pada tahun 2018 meninggalkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakatnya. Bencana tersebut tidak hanya menelan lebih dari 3.600 korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan kerugian materiil yang sangat besar, dengan ribuan rumah hancur dan infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, serta tempat ibadah rusak parah. Sebagai akibat dari kerusakan yang meluas, lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi, menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam upaya memulai kembali kehidupan mereka. Dalam kondisi darurat ini, relokasi permukiman menjadi langkah utama yang diambil untuk memberikan harapan dan kehidupan baru bagi para korban.


EP CALM
My Principle



Pemerintah Indonesia merespon bencana ini dengan prinsip *Build Back Better*, yang bertujuan untuk tidak hanya membangun hunian yang lebih tahan bencana tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah pembangunan hunian relokasi (Huntap) dengan total sekitar 9.140 unit yang tersebar di berbagai lokasi. Sebagian besar dari pembangunan tersebut difasilitasi oleh pemerintah, namun ada juga bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkontribusi untuk mempercepat proses pemulihan. Hunian relokasi ini tidak hanya sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan ketahanan masyarakat untuk bangkit kembali.

Proses relokasi ini tidak hanya melibatkan pemindahan fisik korban ke hunian baru. Tantangan besar yang dihadapi adalah perubahan sosial dan ekonomi yang harus dihadapi oleh penghuni huntap. Sebagian besar korban bencana sebelumnya tinggal di wilayah yang memiliki hubungan erat dengan alam, atau hidup dengan pola interaksi sosial yang lebih kental. Relokasi mereka ke lingkungan yang lebih urban atau bahkan terisolasi menuntut mereka untuk beradaptasi dengan cara hidup yang berbeda, serta sistem sosial yang baru. Pergeseran ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan sosial, mata pencaharian, serta cara-cara tradisional berinteraksi di masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan ini, penting adanya pendampingan sosial yang memadai untuk membantu masyarakat beradaptasi dengan cepat. Penyuluhan dan dukungan psikososial menjadi hal yang sangat penting untuk membantu korban bencana memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Interaksi sosial di Huntap yang lebih terbatas dan cenderung lebih formal dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun kembali jaringan sosial. Pendampingan ini, baik dari pemerintah, LSM, maupun komunitas lokal, berperan besar dalam memastikan masyarakat dapat menghadapi perubahan dan mengatasi kesulitan yang muncul. Tak hanya itu, pendampingan sosial juga berperan dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang hancur akibat bencana. Banyak korban bencana yang kehilangan mata pencaharian utama mereka, dan untuk itu penting adanya upaya untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Masyarakat perlu diberikan pelatihan keterampilan baru agar mereka dapat beradaptasi dengan pola hidup yang lebih berkelanjutan. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagian penting dari proses ini, yang membantu masyarakat untuk bangkit secara ekonomi dan mencapai kemandirian.

Keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi juga menjadi hal yang sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan Huntap dapat menciptakan rasa memiliki

terhadap lingkungan baru mereka. Dengan rasa memiliki yang kuat, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga dan merawat tempat tinggal mereka, serta berkontribusi dalam pengembangan lingkungan sekitar. Keterlibatan ini juga memberikan masyarakat kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi. Dalam relokasi pascagempa ini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam kesuksesan. Pemerintah, LSM, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap aspek dari proses relokasi berjalan dengan lancar. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas umum, sementara LSM dapat membantu dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sendiri, dengan dukungan dari berbagai pihak, perlu aktif berpartisipasi dalam proses ini agar hasil yang dicapai lebih maksimal.

Proses relokasi ini juga menguji ketahanan sosial masyarakat. Masyarakat yang dulunya lebih bergantung pada kehidupan sosial yang dekat dengan alam, kini dihadapkan dengan lingkungan yang lebih urban, yang menuntut mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan yang lebih modern dan sistem sosial yang lebih kompleks. Hal ini tidak selalu mudah, mengingat perbedaan budaya, pola hidup, dan kebiasaan yang telah terbentuk lama.

Namun, dengan adanya dukungan sosial yang tepat, mereka dapat mengatasi tantangan ini dan membangun komunitas yang lebih tangguh. Dalam jangka panjang, keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat proses pemindahan dilakukan, tetapi juga oleh seberapa efektif masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Proses adaptasi yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan mandiri, yang mampu mengelola sumber daya mereka dengan baik dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Relokasi, jika dilakukan dengan tepat, dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi para korban bencana.

Dengan seluruh tantangan yang ada, relokasi pascagempa Sulawesi Tengah bisa dijadikan contoh bagaimana sebuah komunitas dapat bangkit dan beradaptasi setelah bencana besar. Kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik dan lebih tangguh. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan relokasi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah yang tepat, relokasi bisa menjadi proses yang tidak hanya mengembalikan kehidupan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih siap menghadapi bencana di masa depan.

Pendampingan dalam Proses Relokasi

Pendampingan dalam proses relokasi pascagempa Sulawesi Tengah merupakan upaya yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan adaptasi masyarakat dalam lingkungan hunian yang baru. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan berbagai aspek yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi pascabencana. Pendampingan ini dirancang dalam tiga tahap utama, yang masingmasing memiliki peran strategis dalam memfasilitasi transisi yang mulus bagi para korban bencana.

Pada tahap pertama, fokus utama adalah memberikan sosialisasi kepada warga terdampak mengenai proses relokasi. Dalam tahap ini, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari relokasi tersebut. Masyarakat perlu memahami bahwa relokasi bukan hanya sekadar pemindahan fisik, tetapi juga merupakan langkah untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman di masa depan. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang prosedur yang akan dijalankan, serta tahapan yang harus dilalui oleh setiap individu dan keluarga yang terdampak. Verifikasi penerima bantuan juga menjadi bagian


KEMENTERIAN PUPR
H. MARJUKI



penting dalam tahap ini untuk memastikan distribusi bantuan dilakukan dengan tepat sasaran.

Selain itu, pada tahap pertama ini juga dilakukan penyusunan dokumen LARAP (Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang berfungsi untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari proses relokasi tersebut. LARAP ini sangat penting untuk memahami berbagai perubahan yang mungkin terjadi pada masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Pendampingan teknis yang dilakukan pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami perubahan yang akan terjadi, serta siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama proses relokasi.

Setelah tahapan sosialisasi dan verifikasi selesai, tahap kedua dimulai, yaitu ketika penghunian Huntap mulai dilakukan. Pada tahap ini, pendampingan berfokus pada distribusi kunci rumah dan pengelolaan lingkungan. Setiap warga yang menerima hunian baru perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana merawat rumah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. Tujuannya untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial dan memastikan bahwa hubungan antarwarga dapat terjalin dengan baik. Pendampingan juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di tempat tinggal baru.

Proses adaptasi di Huntap seringkali memerlukan waktu, karena masyarakat yang sebelumnya hidup di lingkungan yang lebih terbuka dan dekat dengan alam kini harus beralih ke kehidupan yang lebih terstruktur dan terkendali. Oleh karena itu, penting bagi pendamping untuk mendampingi mereka dalam memahami kehidupan baru ini. Salah satu fokus utama adalah mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarwarga Huntap, melalui kegiatan sosial dan program pengembangan komunitas. Dengan menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung, masyarakat akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.

Tahap ketiga adalah pendampingan penghuni, yang berfokus pada pengelolaan rumah dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan mereka. Pada tahap ini, pendampingan berlanjut dengan pelatihan pengembangan mata pencaharian, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan warga dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pembekalan dalam hal kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar masyarakat tidak hanya dapat bertahan hidup di tempat tinggal baru, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam pendampingan pascapenghuni adalah pembentukan kelompok Operasi dan Pemeliharaan (O&P). Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengelola fasilitas umum yang ada di Huntap, seperti jalan, taman, dan fasilitas lainnya yang dibangun untuk mendukung kehidupan sehari-hari warga. Partisipasi aktif masyarakat dalam kelompok O&P sangat penting, karena mereka yang paling tahu tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di Huntap. Kelompok ini juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui berbagai pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha produktif.

Kelompok O&P juga memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat fasilitas umum yang ada di Huntap. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, fasilitas-fasilitas ini dapat dijaga dengan baik dan digunakan secara optimal. Selain itu, kelompok ini juga dapat menjadi pusat untuk berbagai inisiatif lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, kelompok ini tidak hanya berfungsi untuk pemeliharaan fisik Huntap, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Selain itu, kelompok O&P juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara warga, pemerintah, dan lembaga lainnya. Kelompok ini menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada

pihak yang berwenang, serta untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan huntap akan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Proses pendampingan dalam relokasi pascagempa ini tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi dan lingkungan. Pendampingan yang terintegrasi dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha baru, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Dengan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan lingkungan, serta pembentukan kelompok-kelompok yang aktif, masyarakat dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik dan lebih mandiri. Pendampingan yang efektif akan memastikan bahwa relokasi bukan hanya sekadar memindahkan fisik rumah, tetapi juga membantu membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Pendampingan dalam proses relokasi pascagempa Sulawesi Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan hunian baru mereka. Melalui tiga tahap pendampingan yang saling berkaitan, masyarakat dapat dibimbing untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul. Dengan kerjasama yang

baik antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, proses ini dapat memberikan hasil yang positif dalam jangka panjang, menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan mandiri, serta memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan layak dan sejahtera di masa depan.

Tantangan Sosial dan Ekonomi Pasca Relokasi

Meskipun pendampingan telah dilakukan secara menyeluruh, tantangan yang dihadapi masyarakat pascarelokasi tetap tidak sedikit. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perubahan signifikan dalam cara hidup mereka. Sebelum relokasi, banyak warga yang menggantungkan hidup pada sektor-sektor yang dekat dengan lokasi hunian mereka sebelumnya, seperti perikanan dan pertanian. Namun, setelah relokasi, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin jauh dari sumber penghidupan tersebut. Perubahan ini mempengaruhi pola ekonomi masyarakat, yang terbiasa dengan akses mudah ke sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka.

Selain itu, banyak warga juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi fisik lingkungan yang baru. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketersediaan fasilitas dasar


MASALAH &
DAMPAK
POTENSI
PILIHAN



yang tidak memadai. Beberapa lokasi huntap masih menghadapi masalah dalam hal pasokan air bersih, akses listrik yang stabil, dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang belum optimal. Kondisi ini membuat kehidupan sehari-hari di Huntap menjadi lebih menantang, terutama bagi warga yang terbiasa dengan fasilitas yang lebih lengkap di tempat tinggal lama mereka. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan, masalah-masalah ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kehidupan yang lebih layak di masa depan.

Selain masalah fisik dan infrastruktur, isu sosial juga muncul di lingkungan baru. Banyak warga yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial, seperti pembentukan hubungan antarwarga yang baru dan pemahaman terhadap kebiasaan serta budaya yang berbeda. Proses ini memerlukan waktu dan pendekatan yang hati-hati agar tercipta hubungan yang harmonis di antara sesama penghuni Huntap. Ketegangan sosial dan masalah komunikasi antarwarga bisa saja terjadi, terutama dalam konteks perbedaan latar belakang dan kebiasaan hidup sebelum relokasi. Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa perkembangan positif yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah adanya peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi bagi beberapa warga yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan atau keterampilan baru. Sebanyak 733 warga telah mengikuti pelatihan pengembangan usaha produktif yang membantu

mereka dalam membangun usaha baru dan meningkatkan keterampilan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membuka peluang baru dalam ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan pelatihan ini menciptakan individu-individu yang lebih siap untuk mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat sekitar.

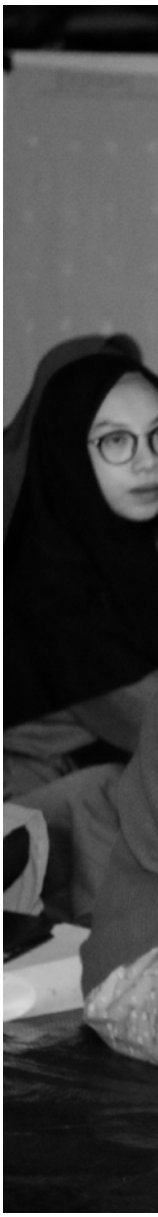
Peningkatan pendapatan masyarakat juga terlihat pada jumlah rumah yang mengalami peningkatan untuk memenuhi standar teknis yang aman dan nyaman. Sebanyak 909 rumah telah mengalami perbaikan yang mencakup fasilitas dan struktur yang lebih baik, memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil untuk meningkatkan kualitas hunian di Huntap, meskipun tantangan dalam penyediaan fasilitas dasar masih perlu diatasi lebih lanjut. Peningkatan kualitas rumah menjadi salah satu indikator keberhasilan pendampingan yang dilakukan dalam memfasilitasi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat pascarelokasi.

Pembentukan kelompok usaha produktif di Huntap juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Dengan adanya kelompok-kelompok ini, warga dapat bekerja sama dalam mengelola usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan perekonomian mereka secara kolektif. Kelompok usaha ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi

juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan keluarga. Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat ini menjadi salah satu pondasi penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi setiap individu dan keluarga di Huntap. Namun, meskipun ada perkembangan yang positif, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas dasar dan dukungan sosial untuk masyarakat. Ketersediaan fasilitas seperti sekolah, tempat ibadah, dan akses jalan yang memadai masih menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Tanpa dukungan yang memadai dalam hal fasilitas publik, masyarakat akan kesulitan untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan berkualitas. Oleh karena itu, perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah, LSM, maupun masyarakat sendiri, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar ini dapat terpenuhi dengan baik.

Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat pascarelokasi, proses adaptasi mereka tidak lepas dari pencapaian yang signifikan. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan, perbaikan rumah, dan pembentukan kelompok usaha produktif, masyarakat mulai menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pendampingan yang berkelanjutan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses relokasi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Peran Perempuan dalam Proses Relokasi



Peran perempuan dalam proses relokasi pascagempa di Sulawesi Tengah menjadi elemen penting yang patut mendapat perhatian lebih. Dalam banyak kasus, perempuan yang sebelumnya terpinggirkan mulai menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam proses penyediaan Huntap dan pengambilan keputusan terkait pembangunan hunian tetap. Data menunjukkan bahwa 35% perempuan yang bukan warga terdampak bencana (non-WTB) mengetahui peluang kerja yang ada, sementara 40% perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan Huntap. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam membentuk arah pembangunan.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan kapasitas komunitas. Dengan adanya keterlibatan perempuan, tercipta peluang baru dalam pembangunan ekonomi lokal. Perempuan berperan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pengelolaan rumah tangga dan lingkungan sekitar mereka. Keterlibatan ini mempercepat pemulihan pascagempa karena perempuan sering kali menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Perempuan memainkan



peran yang sangat vital dalam memastikan keberlanjutan dan perkembangan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka terlibat dalam pengelolaan lingkungan sekitar Huntap, seperti merawat kebersihan dan mengorganisir kegiatan komunitas. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan lingkungan ini memiliki dampak besar dalam menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman, sehingga mempercepat proses adaptasi dan pemulihan masyarakat pascabencana. Dengan adanya partisipasi perempuan, pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi menjadi lebih terjamin.

Pemberdayaan perempuan dalam setiap tahapan pemulihan pascabencana terbukti menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Ketika perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam kegiatan ekonomi, mereka mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Pemberdayaan ini juga membantu perempuan untuk lebih mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Peningkatan kapasitas usaha juga menjadi isu penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Masyarakat, termasuk perempuan, membutuhkan pelatihan dan pendampingan

yang lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam mengelola usaha produktif. Pelatihan ini akan membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Partisipasi aktif perempuan dalam usaha produktif ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan. Dukungan dari pemerintah dan organisasi terkait juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan. Tanpa dukungan yang memadai, proses transisi dari keadaan darurat ke kehidupan yang lebih stabil akan sangat lambat. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan segera. Di samping itu, pemerintah dan organisasi terkait harus terus memperkuat kapasitas masyarakat melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang dapat membantu mereka mandiri dalam mengelola kehidupan mereka pascabencana.

Penting untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan dan penghidupan mereka secara mandiri. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran penting karena mereka seringkali yang paling terdampak secara langsung oleh kondisi sosial dan ekonomi pascabencana. Dengan memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola usaha dan lingkungan mereka, proses pemulihan akan berjalan lebih cepat dan lebih berkelanjutan. Pendampingan yang berkelanjutan dan keterlibatan

aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya saing.

Proses relokasi ini menggambarkan betapa pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahapan pemulihan pascabencana. Melalui pemberdayaan perempuan, bukan hanya perekonomian lokal yang berkembang, tetapi juga kualitas kehidupan sosial dan budaya yang lebih baik. Dengan memperkuat peran perempuan, masyarakat yang terdampak bencana dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Oleh karena itu, keberlanjutan pemberdayaan perempuan dalam proses relokasi menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Relokasi permukiman pascagempa di Sulawesi Tengah menggambarkan betapa kompleksnya upaya membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi para korban bencana. Proses ini tidak hanya soal memindahkan fisik rumah, tetapi juga membangun kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif perempuan, proses relokasi ini menjadi lebih menyeluruh dan berdampak lebih luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan.

Kondisi Fasilitas di Huntap

Kondisi fasilitas dasar di Huntap pascarelokasi sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Fasilitas utama seperti air bersih, listrik, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan sistem penyediaan air minum (SPAM) sudah tersedia, namun kualitas dan konsistensinya masih menjadi perhatian utama. Salah satu masalah utama adalah pasokan air bersih, terutama pada musim hujan, di mana beberapa responden melaporkan bahwa air sering kali keruh akibat tercemarnya aliran air. Hal ini mengganggu penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak dan mencuci. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa warga harus menampung air hujan atau membeli air dalam tangki saat pasokan air terganggu.

Meskipun pasokan air melalui sistem baru, seperti sumur bor dan PDAM yang diperbaiki, telah membantu mengurangi masalah ini, kualitas air seringkali terganggu, terutama saat musim kemarau atau cuaca ekstrem. Pasokan air bisa terhenti beberapa hari, yang masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Huntap. Meskipun demikian, ada upaya dari pemerintah dan pengelola Huntap untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan





air bersih, yang perlu terus diperbaiki agar pasokan air tetap memenuhi standar, terutama selama cuaca ekstrem. Fasilitas listrik di Huntap umumnya berjalan lancar, meskipun ada beberapa keluhan mengenai daya listrik yang lebih rendah dari yang dijanjikan. Namun, gangguan listrik sudah jauh berkurang dan tidak lagi menjadi isu utama. Sebagian besar warga merasa puas dengan ketersediaan listrik, meskipun masih ada beberapa keluhan terkait daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Penerangan jalan di beberapa bagian Huntap masih menjadi masalah kecil, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan kenyamanan warga saat malam hari.

Fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan akses jalan sudah cukup memadai di sekitar Huntap. Sekolah yang ada di sekitar Huntap sudah berfungsi, namun sebagian besar sekolah tersebut merupakan sekolah swasta. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi warga yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Salah satu saran yang diajukan oleh warga adalah penambahan fasilitas sekolah negeri agar semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah, dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Untuk tempat ibadah, meskipun sudah ada masjid yang dibangun, beberapa warga masih menginginkan adanya tempat ibadah yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh semua golongan, termasuk bagi mereka yang non muslim. Hal ini penting

untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama di Huntap, mengingat keberagaman yang ada di sana. Warga berharap bahwa tempat ibadah yang ada dapat memenuhi kebutuhan spiritual mereka dengan baik.

Akses jalan di sekitar Huntap sudah cukup memadai, namun beberapa bagian jalan masih belum diaspal dengan baik. Sebagian besar warga merasa bahwa jalan utama di Huntap sudah dalam kondisi baik dan mendukung kelancaran aktivitas seharihari. Meskipun demikian, beberapa warga masih merasa bahwa beberapa jalan perlu perbaikan agar lebih nyaman dan mudah diakses. Beberapa bagian jalan yang belum diaspal dengan baik menjadi penghambat bagi mobilitas warga, terutama saat musim hujan. Selain itu, ada kebutuhan untuk pembangunan fasilitas publik lainnya, seperti pasar. Akses ke pasar yang jauh dari lokasi Huntap menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan seharihari. Oleh karena itu, pembangunan pasar yang lebih dekat dengan Huntap dianggap penting untuk mempermudah warga dalam berbelanja kebutuhan pokok. Dengan adanya pasar yang lebih dekat, warga dapat menghemat waktu dan biaya transportasi.

Meskipun fasilitas dasar di Huntap sudah tersedia, beberapa keluhan dari warga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang lebih lengkap dan mudah diakses. Peningkatan kualitas fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar akan sangat membantu

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Huntap. Selain itu, perhatian yang lebih besar terhadap perbaikan infrastruktur air bersih dan jalan akan sangat membantu warga dalam menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan layak pascarelokasi. Kualitas dan konsistensi pasokan air bersih, serta beberapa fasilitas umum, masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Pemerintah dan pengelola Huntap perlu terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur dan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa kehidupan di Huntap berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

Dengan peningkatan kualitas fasilitas dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, Huntap dapat menjadi contoh pemukiman yang layak huni dan memberikan kenyamanan bagi warganya. Keberadaan fasilitas dasar yang memadai, serta fasilitas umum yang lebih lengkap, akan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi di Huntap, membantu masyarakat untuk lebih mandiri, dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua.

Kelompok Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Huntap

Kelompok Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Huntap memiliki peran yang sangat penting dalam pemeliharaan fasilitas umum seperti saluran air, listrik, dan kebersihan lingkungan. Meskipun sebagian besar responden mengetahui adanya kelompok O&P dan beberapa di antaranya terlibat aktif, pengelolaan kelompok ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Beberapa responden merasa bahwa pengelolaan fasilitas sudah cukup baik melalui inisiatif lain, seperti kerja bakti atau kegiatan yang diorganisir oleh RT/RW. Masyarakat tidak terlibat dalam kelompok O&P karena pengelolaan fasilitas dianggap sudah ditangani oleh pihak lain, seperti yayasan atau kelompok relawan. Selain itu, kegiatan pemeliharaan lebih bergantung pada kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat. Namun, beberapa responden yang terlibat dalam O&P merasa bahwa kelompok ini sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Huntap. Keterlibatan warga dalam O&P Huntap masih belum optimal, mungkin karena kurangnya informasi atau kesadaran mengenai peran kelompok ini. Banyak warga yang hanya terlibat dalam kegiatan langsung seperti kebersihan lingkungan yang diorganisir oleh RT/RW.




SNI

Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan warga agar kelompok O&P dapat berfungsi secara maksimal dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada di Huntap. Keterlibatan mereka dalam proses pembangunan Huntap masih sangat terbatas. Meskipun sebagian warga mendukung rencana penataan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah, mereka merasa tidak cukup dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sebagian besar warga merasa bahwa kebijakan dan keputusan mengenai pengelolaan dan pembangunan Huntap sudah ditentukan tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan mereka.

Dalam hal ini, banyak yang berharap agar pemerintah lebih terbuka dan proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan. Mereka menginginkan adanya forum atau wadah yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, terutama terkait dengan fasilitas yang mereka butuhkan di lingkungan Huntap. Adanya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan warga yang bersifat lokal dan kontekstual. Beberapa warga mengungkapkan kekecewaan terkait dengan kurangnya transparansi dalam pembagian bantuan dan program yang ada. Banyak yang merasa bahwa bantuan

atau program yang tersedia tidak merata, terutama dalam hal pembagian bantuan modal atau pelatihan kewirausahaan. Hal ini membuat sebagian warga merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, mereka berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan pemerataan distribusi bantuan dan menyediakan dukungan yang lebih merata bagi seluruh warga.

Masyarakat juga berharap adanya peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai informasi terkait dengan program-program yang sedang berjalan, termasuk penyuluhan atau sosialisasi tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga Huntap. Mereka juga menginginkan agar pengelolaan sumber daya alam, seperti air bersih, bisa lebih baik, dan agar pemerintah dapat lebih tanggap terhadap keluhan yang ada, misalnya terkait kualitas air atau kesulitan akses ke fasilitas umum. Relokasi ke Huntap menjadi pengalaman yang penuh tantangan bagi sebagian besar warga, baik dari segi sosial, fisik, maupun ekonomi. Meskipun ada sejumlah masalah yang dihadapi, terutama terkait dengan fasilitas dasar seperti air bersih, jarak dari pusat aktivitas ekonomi, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, banyak warga yang tetap menunjukkan sikap positif dan berharap bisa beradaptasi lebih baik seiring waktu. Proses relokasi ini juga membuka peluang untuk memulai kehidupan baru yang lebih aman dan stabil bagi

sebagian orang, meskipun tantangan tetap ada.

Keberhasilan program pelatihan kewirausahaan yang diberikan setelah relokasi memberikan dampak positif bagi beberapa warga, meskipun masih banyak yang merasa bahwa pelatihan tersebut perlu ditingkatkan agar lebih terarah dan berkelanjutan. Masyarakat berharap agar program ini bisa lebih melibatkan mereka dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keterampilan yang mereka miliki. Selain itu, peningkatan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan bantuan menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di Huntap. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah infrastruktur yang belum memadai, khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih dan akses ke fasilitas umum. Namun, banyak warga yang tetap bersyukur dengan bantuan yang diberikan dan berharap pemerintah terus memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui kebijakan yang lebih inklusif dan pemerataan pembangunan. Sebagai langkah ke depan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan Huntap untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan relokasi ini.

Keterlibatan masyarakat dalam kelompok O&P masih terbatas, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi atau kesadaran tentang peran kelompok tersebut. Selain itu, masalah seperti ketidakmerataan distribusi bantuan dan

kurangnya transparansi dalam program-program pemerintah juga menjadi hambatan bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan kehidupan di Huntap.

Untuk itu sebagai solusi yang perlu dilakukan ke depan adalah dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar lebih terbuka dan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan Huntap. Pembangunan forum atau wadah komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka akan sangat membantu. Selain itu, pemerintah harus memastikan pemerataan distribusi bantuan, memperbaiki fasilitas dasar seperti air bersih, dan menyediakan pelatihan kewirausahaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan harus didorong, agar proses relokasi Huntap dapat lebih sukses dan membawa manfaat jangka panjang bagi warga yang tinggal di sana.

Keberhasilan Pasca Pendampingan oleh PUPR



Pendampingan pascarelokasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membawa banyak perubahan positif di lingkungan Hunian Tetap (Huntap). Salah satu keberhasilan terbesar adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar. Fasilitas seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), listrik, dan pengelolaan air limbah yang sebelumnya menjadi masalah utama kini sudah lebih stabil dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur ini juga menunjukkan peningkatan, berkat pelatihan teknis yang diberikan selama masa pendampingan.

Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan kelompok Operasi dan Pemeliharaan (O&P) menjadi salah satu tonggak keberhasilan pendampingan PUPR. Kelompok ini kini mampu menangani perbaikan kecil secara mandiri, seperti memperbaiki kebocoran pipa atau kerusakan jaringan listrik sederhana. Hal ini mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga Huntap. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas. Dampak keberhasilan pendampingan juga terlihat pada aspek


KOTA PALU
PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALU
KEMENTERIAN PUPR
DITJEN PERUMAHAN
TERIMA K NCI
WALI KOTA

pemberdayaan ekonomi. Program pelatihan kewirausahaan yang dirancang sesuai dengan potensi lokal membuka peluang baru bagi warga Huntap untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya, pelatihan dalam pengolahan hasil pertanian dan produksi kerajinan lokal telah membantu beberapa keluarga membuka usaha mandiri. Keberhasilan usaha kecil ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelakunya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Pada dimensi sosial, pendampingan PUPR berhasil menciptakan kohesi sosial di lingkungan Huntap. Kegiatan seperti kerja bakti bersama, lomba kebersihan, dan forum komunitas rutin menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan antarwarga. Sebelumnya, sebagian besar warga berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang sosial yang berbeda, tetapi kegiatan ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Hal ini memperkuat modal sosial yang penting untuk menjaga stabilitas komunitas. Peningkatan aksesibilitas di Huntap juga menjadi salah satu keberhasilan nyata. Pembangunan jalan yang lebih baik memudahkan warga untuk beraktivitas, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Sebelumnya, banyak warga mengeluhkan sulitnya akses ke pusat aktivitas ekonomi atau fasilitas kesehatan, tetapi kini hal tersebut sudah jauh berkurang. Keberhasilan ini sangat membantu mempercepat

adaptasi masyarakat dalam kehidupan baru di Huntap.

Keberhasilan lain adalah meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan warga Huntap. Pendampingan PUPR yang mencakup pelatihan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan telah menghasilkan perubahan perilaku yang positif. Kini, warga lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, misalnya melalui pengelolaan limbah domestik yang lebih baik. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, keberhasilan program pendampingan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan keberlanjutan program setelah pendampingan selesai. Meski kelompok O&P telah menunjukkan hasil yang positif, keberlanjutan ini memerlukan dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk pelatihan tambahan maupun pendanaan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa upaya-upaya ini terus berjalan agar masyarakat tidak kembali menghadapi kendala yang sama.

Salah satu indikator keberhasilan lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran di Huntap. Program pelatihan kerja yang disediakan selama pendampingan memberikan bekal keterampilan baru bagi warga, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi. Beberapa warga yang sebelumnya kesulitan

mencari pekerjaan kini berhasil mendapatkan penghasilan melalui usaha kecil atau pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan baru mereka. Pendampingan pascarelokasi juga berhasil mengubah cara pandang masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Melalui forum diskusi yang rutin diadakan selama program pendampingan, warga menjadi lebih memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara warga dan pemerintah, dengan komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan keberhasilan dari pendampingan oleh PUPR menunjukkan pentingnya pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dampak positif yang dirasakan masyarakat Huntap menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya berhasil menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga tetapi juga meletakkan dasar yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan di masa depan. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi model untuk program pendampingan serupa di wilayah lain yang menghadapi tantangan pasca-bencana.


PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI
PUPR

Daftar Pustaka

Andri Irfan Rifai, Eko Galih Prasetyo, dan Hikmawati Thalib. *Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Pasca Bencana Gempa Dan Liquefaksi.* Proceeding Civil Engineering Research Forum Vol. 2, No. 1, Juli 2022

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kab. Sigi 2019-2020

Lien Sururoh. *Sulawesi Tengah Memori dan Pengetahuan Lokal tentang Bencana.* Perkumpulan Skala Indonesia. 2020.

Project Operation Manual (POM) Kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), 2019 - 2024, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Monitoring Penyediaan Hunian Tetap NSUP-CERC/CSRRP di Sulawesi Tengah. Tim Monitoring Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Skp-Ham) Sulawesi Tengah. 2020.

Nur Hidayah, Iman Satyarno, and Ashar Saputra. *Housing rehabilitation and reconstruction in Central Sulawesi post-2018 earthquake.* 2020.

Moh Syafari Firdaus (ed). Praktik Baik: *Proses Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana di Sulawesi Tengah*, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2024.

https://sitaba.pu.go.id/sulteng/huntap

Prosedur Operasional Standar Pembangunan Rumah Tahan Gempa, Relokasi Permukiman Berbasis Komunitas Bagi Warga Terdampak Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018. Kementerian PUPR. 2018.

https://monitoring.skp-ham.org/14-hektar-lahan-huntap-petobo-sudah-clear/

Tasman Banto, *Likuefaksi Palu Menggemparkan Dunia, Intergensia Media* (Intrans Plubishing Group), 2024.

Profil

Basri Marzuki, lahir di Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini, ia berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Ia menekuni fotografi sejak 1998 sebagai pehobi otodidak. Karir foto jurnalistiknya dimulai sejak tahun 2001 pada sebuah harian lokal di Palu. Secara bersamaan ia juga dikontrak oleh kantor berita resmi Indonesia dan agensi foto asing. Liputan foto jurnalistik Basri cukup beragam antara lain konflik sosial, kerusuhan, politik, kriminal, olahraga hingga foto religi.

Hingga kini, karya fotonya telah diterbitkan di berbagai media baik lokal, nasional hingga internasional. Ia juga meraih Honorable Mention pada Global Change Photo Award di Jepang dan sederet apresiasi lain dari dalam negeri. Pada tahun 2007, World Press Photo (WPP) memberinya beasiswa dalam bidang *photojurnalism*.

Selain itu, ia juga mengerjakan berbagai *project photo story* untuk dokumentasi organisasi nirlaba dan perusahaan komersial. Organisasi nirlaba yang pernah menggunakan materi fotonya antara lain World Bank untuk laporan realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia pascareformasi. Pada tahun 2018, Basri menjadi bagian dari tim fotografer resmi pada Asian Games di Jakarta.

Basri juga terlibat aktif dalam organisasi profesi jurnalis dan fotografer baik di tingkat lokal maupun nasional. Ia menjabat sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu dan ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu sejak 2008 hingga 2017. Ia juga kerap menjadi mentor dan juri untuk beberapa berbagai pelatihan jurnalistik tingkat mahasiswa, komunitas foto dan berbagai kompetisi foto tingkat regional.

Dwi Pramono Cahyo, lahir di Jakarta, 22 Januari 1979. Setelah menamatkan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, ia memfokuskan diri pada bidang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, rehabiltasi dan rekonstruksi pascabencana, serta resolusi konflik.

Keahlian ini telah membawanya bekerja di kementerian, lembaga, pergi ke berbagai daerah bencana dan bertemu beragam komunitas di Indonesia. Sementara bekerja, ia sering mengabadikan peristiwa-peristiwa penting melalui keahlian yang dia dapat di Unit Kegiatan Fotografi (FOCUS UMM) semasa mahasiswa.

Heru Prasetia, lahir di Magelang pada 21 Desember 1977, adalah peneliti, editor, penulis, dan ahli strategi kampanye yang berkiprah di bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Lulusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM pada tahun 2002 ini memiliki pengalaman lebih dari dua dekade dalam penelitian dan advokasi, khususnya terkait hak-hak minoritas, multikulturalisme, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sebagai editor, Heru telah menyunting berbagai buku penting, termasuk laporan tentang bencana seperti Bencana Lumpur Lapindo: Kegagalan Negara dan Masyarakat Sipil serta Kronik Lumpur Lapindo. Sebagai penulis, ia telah menghasilkan berbagai laporan, termasuk laporan tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gunung Merapi di Yogyakarta.

Josua Marunduh, tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Josua merupakan seorang fotografer yang secara spesifik mengerjakan beberapa pemotretan untuk kebutuhan dokumenter, karya jurnalistik, serta kebutuhan instansi pemerintah maupun swasta. Ia memiliki sertifikasi kompetensi sebagai fotografer profesional yang diakui oleh negara. Ia juga tercatat sebagai instruktur fotografi dan juri dalam beberapa pelatihan dan kompetisi fotografi. Josua Marunduh pernah bekerja sebagai kontributor foto National Georaphic Indonesia (2016 – 2022), Assosiated Press (2021 – 2022). Kini, ia menjabat sebagai koordinator PFI Palu (2021 – 2024). E-mail: josuamarunduh.photowork@gmail.com.

Kusen Alipah Hadi, lahir di Yogyakarta pada tahun 1975. Ia mengaku sebagai praktisi antropologi, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen seni. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia aktif pada beberapa lembaga swadaya masyarakat, menginisiasi beberapa festival warga, hingga terlibat mendirikan dan mengembangkan jaringan festival warga Begawai Nusantara.

Bersama rekan-rekan penulis, ia terlibat dalam mendokumentasikan praktik baik rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Yogyakarta, pascaerupsi Gunung Merapi, serta pascagempa Sumatera Barat.

Muklas Aji Setiawan, lahir di Bantul 1983, Yogyakarta. Ia mengenyam pendidikan Strata 1, Jurusan Antropologi, Universitas Gadjah Mada. Konsultan dan implementator program pemberdayaan ini mengaku belajar pengembangan masyarakat bersama Yayasan Pondok Rakyat, sebuah lembaga yang diinisiasi oleh YB Mangun Wjaya di Yogyakarya. Selanjutnya, ia menekuni kajian pembangunan pedesaan-perkotaan, terutama berkait dengan pemberdayaan masyarakat dan monitoring-evaluasi. Belakangan, pekerjaan membawanya ke kajian lingkungan dan kebencanaan.

Muklas Aji Setiawan juga pernah bekerja di Yayasan AKATIGA, The Asia Foundation, Yayasan Konservasi Nusantara, serta proyek berbagai kementerian. Email: moeklas@gmail.com.

Muh Taufan Surya Putra Bustan atau Taufan Bustan, adalah jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, kelahiran 5 Februari 1989. Ia bekerja di Media Indonesia dan sejumlah kantor berita asing, dengan karya yang telah dimuat di media internasional seperti EPA, AFP, AP, Xinhua, Al Jazeera, DPA, BBC, CNN, dan Daily Mail.

Taufan mendirikan agensi foto dan video Opn Images Indonesia pada 2019 serta portal berita Eranesia.id pada tahun ini. Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun sebagai jurnalis, ia telah meliput di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya isu kebencanaan selama enam tahun terakhir, termasuk gempa Lombok (2018), gempa-tsunami-likuifaksi Palu (2018), gempa Selat Sunda (2018), gempa Mamuju (2021), dan liputan kebencanaan lainnya.

Selama bekerja, Taufan juga sudah menerima beberapa penghargaan nasional atas karya foto dan tulisan di bidang jurnalistik. Saat ini, Taufan tengah menyelesaikan buku foto pertamanya.

Wijang Wijanarko, lahir di Yogyakarta 6 Juli 1972. Ia mengenyam Pendidikan Strata 1 Jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Gadjah Mada. Sebagai Arsitek yang menekuni bidang perumahan dan permukiman, ia juga aktif melakukan pemberdayaan di bidang perumahan dan permukiman sejak Program P2BPK tahun 1998, Program Cobild, Program P2KP, dan lain sebagainya. Selama lebih dari lima belas tahun berkecimpung dalam pendampingan masyarakat korban bencana sektor perumahan dan permukiman di berbagai wilayah di Indonesia. Email: toyotawijang@yahoo.com.

Muhammad Marzuki, lahir di Gimpu, 21 November 1962. Gelar Sarjana Antropologi diraihnya dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1985 dan Magister Sains dalam Kajian Ilmu Lingkungan (Ekologi Manusia) dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Pendidikan dasarnya dimulai di SD Negeri Kulawi (1973), dilanjutkan di SMP Negeri Kulawi (1976) dan SMA Negeri 2 Palu (1980). Dalam karier profesional, sejak 1988, dia menjadi dosen tetap di Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Tadulako, Palu. Selain itu, menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Lingkungan UNTAD dan Ketua Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik (P4K). Pengalaman lainnya mencakup keikutsertaan dalam berbagai penelitian sosial dan lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah, Lampung, hingga Batam, serta keterlibatan aktif dalam seminar internasional di Brisbane, Australia (2012) dan terus berkontribusi melalui penelitian hingga kegiatan akademis di bidang pengelolaan lingkungan, kajian sosial budaya, serta pembangunan berkelanjutan.

Muh. Zainuddin Badollahi, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 November 1990. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Antropologi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan meraih gelar Magister di bidang yang sama pada tahun 2017. Memiliki keahlian di berbagai subdisiplin Antropologi, termasuk Antropologi Pariwisata, Antropologi Kesehatan, Filsafat Antropologi, Studi Etnografi, dan Metode Penelitian Terapan. Saat ini, bekerja sebagai dosen di Program Studi Antropologi, Universitas Tadulako, Palu dan aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.



PT Inersia Ampak Engineers
Konsultan dan Jasa Bisnis



Pada 1 Oktober 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah memobilisasi personil dan alat berat untuk evakuasi korban bencana, menyediakan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, membersihkan kota dari puing-puing bangunan runtuh, serta mulai menyelesaikan masalah konektivitas."Kita harus bisa merasakan apa yang masyarakat rasakan," begitu perintahnya untuk mengejawantahkan operasi kemanusiaan pascabencana Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong
dan wilayah sekitarnya.

diterbitkan oleh
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2024